



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat arah kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- (2) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - Bab 1 Pendahuluan;
 - Bab 2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - Bab 3 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
 - Bab 4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;

Bab 5	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
Bab 6	Kaidah Pelaksanaan; dan
Bab 7	Penutup

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016.
- (2) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2016; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016.

Pasal 3

Dalam menyusun RAPBD Tahun 2016, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut dari RKPD Tahun 2016 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun 2016.

Pasal 5

Rincian lebih lanjut RKPD Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 Mei 2015

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 29 Mei 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 22

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4 Sistematika RKPD	I-5
1.5 Maksud dan Tujuan	I-7

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi.....	II-1
2.1.2 Aspek Demografi.....	II-5
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-6
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II-12
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-13
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Th. 2014 dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	II-17
2.2.1 Urusan Wajib	II-17
2.2.2 Urusan Pilihan	II-60

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	III-4
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-4.....	
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III-4
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-6
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ...	III-6
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-7
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ...	III-9

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

- 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan IV-1
- 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah IV-18

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016

- 5.1 Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2016 V-1
- 5.2 Rencana Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 V-7

BAB VI PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 telah memasuki periode Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun ke 5 dalam rangka menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera maju mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016.

Kebijakan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung infrastruktur yang semakin mantap.

Agar arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 dapat terwujud, maka pembangunan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 di prioritaskan pada upaya-upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar, meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendorong perekonomian daerah, mengoptimalkan pelayanan publik.

Adapun fokus pembangunan 2016 antara lain upaya melaksanakan 4 sektor unggulan yaitu : Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata, juga pemerataan akses dan peningkatan kualitas pelayanan ibu dan anak, pemenuhan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah bagi usia anak sekolah yang tidak sekolah, serta reformasi birokrasi.

Rencana pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2016 di tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2016 yang disusun berpedoman pada RPJMD 2011-2016. Penyusunan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2016 berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tahapan dan proses penyusunan RKPD juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Sedangkan kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 juga sejalan dan sinergi dengan kebijakan Provinsi yang tertuang dalam RPJMD Jawa Tengah 2013 - 2018 dan RPJMN (Nasional) Tahun 2014 - 2019.

RKPD Kabupaten Daerah Tahun 2016 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 yang menjadi Dasar Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Demak Tahun 2016.

RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maupun sumber - sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik, *bottom up planning*, *top down planning*, politik dan partisipatif sebagai kerangka landasan filosofi, serta dilakukan melalui pentahapan yaitu : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang sebelumnya didahului dengan kegiatan Pra Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RKPD.

Persiapan penyusunan RKPD Kabupaten Demak tahun 2016 diawali dengan pembentukan tim penyusun RKPD, dan penyiapan data serta informasi perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya penyusunan rancangan awal RKPD 2016 mencakup antara lain gambaran umum kondisi daerah, analisis perekonomian dan keuangan daerah, evaluasi kerja pembangunan tahun 2014, pokok-pokok pikiran DPRD, pelaksanaan pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah,

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pagu indikatif, penyelarasan rencana program prioritas dan pagu indikatif.

Tahapan selanjutnya dengan penyusunan rancangan RKPD yang merupakan penyempurnaan dari rancangan awal RKPD berdasarkan masukan dan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan harmonisasi serta sinergitas terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016.

Setelah rancangan RKPD tersusun selanjutnya dibahas dalam forum Musrenbang Tahun 2015, sebagai perwujudan pendekatan partisipatif.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Kewajiban daerah menyusun RKPD sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Bidang Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda dan Setwan DPRD Kabupaten Demak;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016;

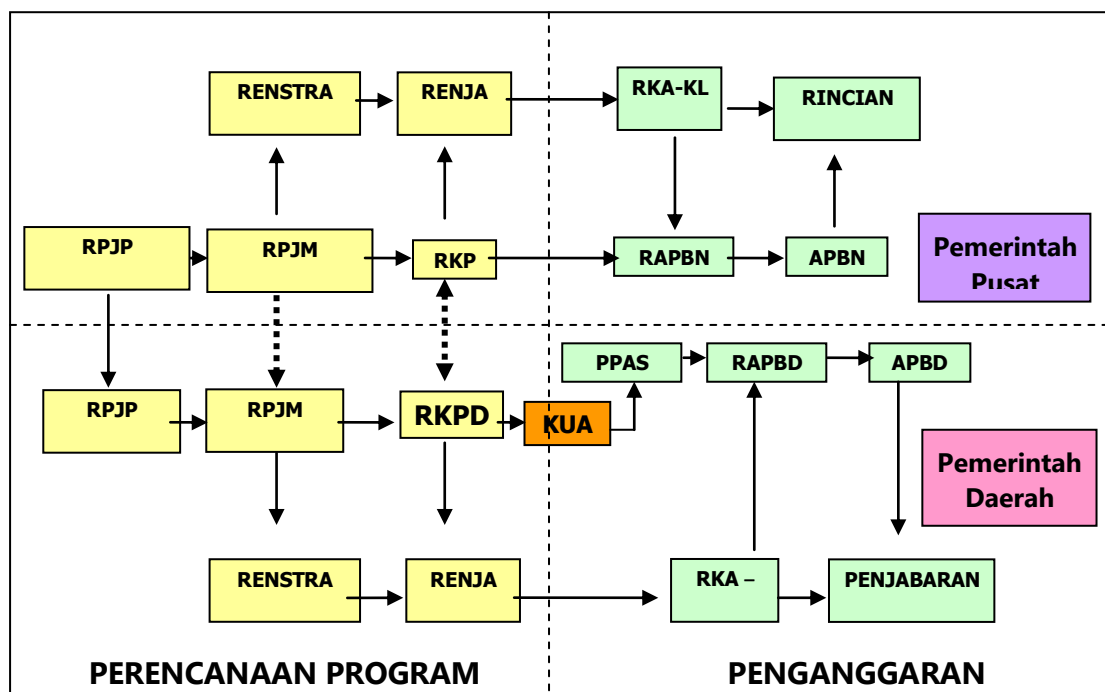
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Kebijakan Pembangunan Kabupaten Demak 2016 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan baik kabupaten, provinsi maupun nasional.

Beberapa dokumen perencanaan yang memiliki keterkaitan RKPD Kabupaten Demak, yaitu :

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Hubungan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2015 dengan dokumen lain dapat dijelaskan sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1.1
Alur Perencanaan Program dan Penganggaran

1.4. SISTEMATIKA RKPD

RKPD Kabupaten Demak Tahun 2016 memiliki sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika RKPD
- 1.5 Maksud dan Tujuan

**BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH**

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1 Aspek Geografi
 - 2.1.2 Aspek Demografi
 - 2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4.1 Fokus Layanan Wajib
 - 2.1.4.2 Fokus Layanan Pilihan
 - 2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2014 dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 2.2.1 Urusan Wajib
 - 2.2.2 Urusan Pilihan

**BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH**

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah
 - 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
 - 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

**BAB IV PRIORITY DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016**

- 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan
- 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITY
DAERAH TAHUN 2016**

- 5.1 Rencana Program PRIORITY Daerah Tahun 2016
- 5.2 Rencana Kegiatan PRIORITY Daerah Tahun 2016

BAB VI PENUTUP

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RKPД Kabupaten Demak Tahun 2016 dimaksudkan untuk:

- 1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016;
- 2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan pRIORITY pembangunan daerah tahun 2016.

Adapun tujuannya adalah untuk :

- 1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016;
- 2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta pRIORITY dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016 sebagai Dasar Penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016;
- 3. Menjadi pedoman penyusunan RKPД Tahun 2016 bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografis

a. Geografis

Wilayah Kabupaten Demak terbagi dalam 14 kecamatan yang terdiri dari 243 desa dan 6 kelurahan, 512 dusun, 1.289 RW dan 6917 RT. Adapun sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, serta sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang. Jarak terjauh dari barat ke timur yaitu 49 km, sedangkan dari utara ke selatan terbentang 41 km.

b. Topografi

Wilayah Kabupaten Demak terdiri atas dataran rendah, pantai serta perbukitan, dengan ketinggian permukaan antara 0-100 meter. Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut, wilayah Kabupaten Demak dibatasi atas 3 region meliputi:

Region A : 0-3 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Bonang, Demak, Karang tengah, Mijen, Sayung dan Wedung.

Region B : 3-10 meter, meliputi sebagian besar di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Demak.

10-25 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Dempet, Karangawen dan Mranggen

25-100 meter, meliputi sebagian besar Kec. Karangawen dan Mranggen

Region C : lebih dari 100 meter, meliputi sebagian kecil Kecamatan Karangawen dan Mranggen.

Kemiringan Lahan di Kabupaten Demak sebagian besar relatif datar, yaitu berada pada lahan dengan kemiringan 0 –

8%. Sedangkan pada bagian selatan Kabupaten Demak memiliki kemiringan lahan yang sangat bervariasi terutama di wilayah Desa Banyumeneng dan Sumberejo. Kedua desa ini memiliki lahan dengan kemiringan 0 – 2%, 2 – 8%, 8 – 15%, 15 – 40%, dan lebih besar dari 40%. Adapun dibawah ini adalah tabel luas lahan berdasarkan kelas lereng.

Tabel 2.1
Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng Kabupaten Demak

Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng	Luas (Ha)
Datar (0-2 derajat)	88.765
Bergelombang (2-15 derajat)	834
Curam (15-40 derajat)	408
Sangat curam (>40 derajat)	136
Ketinggian di atas permukaan laut	0-100

Sumber: BPS Kab. Demak; Demak Dalam Angka Tahun 2013

c. Geologi

Ada beberapa jenis tanah yang ada di Kabupaten Demak, yaitu: (1) Alluvial hidromorf, terdapat di sepanjang pantai; (2) Regosol, terdapat di sebagian besar Kecamatan Karangawen dan Mranggen; (3) Gromosol kelabu tua, terdapat di Kecamatan Bonang, Wedung, Kebonagung, Mijen, Karanganyar, Gajah, Demak, Wonosalam, Dempet dan Sayung, dan (4) Mediteran, terdapat di sebagian besar Kecamatan Karangawen dan Mranggen.

Sebagian besar kondisi tanah yang ada di Kabupaten Demak pada musim kemarau menjadi keras dan retak-retak, sehingga tidak dapat ditanami secara intensif untuk pertanian. Pada musim penghujan tanahnya bersifat lekat sekali dan volumenya membesar, serta lembab sehingga agak sulit untuk ditanami dan memerlukan sistem drainase yang memadai. Pada beberapa daerah tertentu kondisi air tanah yang asin dapat mempengaruhi usaha-usaha petani. Gejala-gejala yang disebabkan oleh air tanah yang asin terutama nampak pada dekat pantai dan sungai/saluran pembuangan yang pada musim kemarau dimasuki air laut.

Struktur Geologi Kabupaten Demak terdiri dari: (1) Struktur Aluvium terdapat hampir semua Kecamatan di

Kabupaten Demak yaitu di Kecamatan Mijen, Bonang, Demak, Gajah, Karanganyar, Wonosalam, Karangtengah, Dempet, Sayung, Guntur, Mranggen dan Karangawen; (2) Miosen, fasies sedimen terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen yaitu di Desa Jragung dan sebagian di Kecamatan Mranggen; (3) Pliosen, fasies sedimen terdapat di sebagian kecamatan Karangawen yaitu di desa Jragug dan sebagian di kecamatan Mranggen; (4) Plistosen, fasies gunung api terdapat di sebagian Kec.Karangawen (Desa Margohayu dan Wonosekar) dan terdapat di Kec.Mranggen (Desa Sumberejo); dan (5) Pliosen, fasies batu gamping yaitu hanya terdapat di Kecamatan Mranggen.

d. Hidrologi/Hidrogeologi (Keairan)

Sumber-sumber air di wilayah Demak berupa sumber air di permukaan tanah dan air tanah. Sumber air di permukaan tanah berasal dari sungai-sungai, laut dan pantai. Sungai-sungai yang ada tergolong besar dan bermuara ke Laut Jawa, antara lain sungai Serang, Tuntang, Jragung, Wulan, Jajar, Onggorawe dan beberapa anak sungai. Sungai-sungai tersebut mempunyai fungsi kompleks, yaitu digunakan sebagai alat transportasi dan juga sebagai penyedia air. Bila dikembangkan dengan teknologi yang lebih maju, sungai tersebut bisa menjadi sumber pengairan teknis persawahan.

Laut dan pantai di Kabupaten Demak memiliki potensi yang cukup prospektif, khususnya untuk pengembangan dibidang perikanan, budidaya hasil laut, dan pariwisata. Untuk memberdayakan potensi laut, perlu adanya peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan, pembangunan SDM dan pelestarian sumber daya hayati perikanan. Selain itu, Demak juga memiliki potensi cekungan air tanah yang cukup tinggi yakni air tanah dangkal sebesar 166,2 juta m³/th dan air tanah dalam sebesar 4,1 juta m³/th.

e. Penggunaan Lahan

Secara administrasi luas wilayah Kabupaten Demak adalah : 89.743 Ha, terdiri atas 14 kecamatan, 243 desa, dan

6 kelurahan sebagai daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, sebagian besar wilayah Kabupaten Demak terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 50.773 Ha (56,58%) dan selebihnya adalah lahan kering.

Menurut penggunaannya sebagian besar lahan sawah yang digunakan berpengairan teknis 37, 25% dan tadah hujan 19,33%. Sedangkan untuk lahan kering 14, 93% digunakan untuk tegal/kebun, 17,12% digunakan untuk bangunan dan halaman, serta 10,63% digunakan untuk tambak.

f. Bencana Alam dan Permasalahan Lingkungan

Kabupaten Demak tidak memiliki potensi bencana alam yang besar seperti Gunung Berapi, gerakan tanah ataupun tanah longsor. Permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan kondisi topografi dan geologi adalah adanya daerah angin topan, banjir, abrasi dan rawan banjir.

Angin Topan. Bencana angin topan di Kabupaten Demak terdapat di Kecamatan Bonang yaitu (Desa Purworejo), Kecamatan Karanganyar (Desa Ketanjung), Kecamatan Sayung (Desa Surodadi, Tugu dan Gemulak), Kecamatan Dempet (Desa Sidomulyo dan Gempoldenok), Kecamatan Wonosalam (Desa Botorejo).

Banjir. Daerah yang sering terjadi banjir pada musim penghujan yaitu hanya terdapat di Kecamatan Guntur yang terdapat di desa Blerong. Bencana banjir yang terjadi sering mengganggu aktifitas penduduk yang ada di daerah kecamatan Guntur. Rawan banjir pada musim penghujan berada di sebagian besar Kecamatan Demak, Sayung Karangtengah, Bonang, Karanganyar, Wonosalam, Guntur dan Mranggen. Hal tersebut dikarenakan berbagai aktivitas manusia dan pesatnya perkembangan pembangunan yang mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap lahan. Perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian dan hutan menjadi lahan untuk perumahan, akan berpengaruh pada berkurangnya tingkat peresapan air ke dalam tanah yang menyebabkan banjir pada musim hujan dan menurunnya permukaan air tanah.

Abrasi. Abrasi terjadi di Kawasan Pesisir Daerah Pantai Kabupaten Demak diakibatkan oleh aktivitas manusia (penebangan hutan mangrove untuk diambil kayunya, dan konversi hutan mangrove menjadi tambak) dan proses alami (terpaan gelombang laut yang terjadi secara terus-menerus serta perubahan pola arus yang menyusur pantai). Konfigurasi daratan pantai yang berupa tonjolan (tanjung) memiliki kontribusi utama sebagai penyebab terjadinya pembelokan arus menyusur pantai (AMP) dan defraksi gelombang yang menuju pantai, sehingga berakibat terjadinya abrasi (erosi) di pantai tertentu. Sebagai imbalan terjadinya fenomena abrasi, akan terjadi pula fenomena akresi (sedimentasi), yang mengakibatkan terjadinya tanah timbul di tempat lain. Dari hasil pengamatan terlihat beberapa tempat yang mengalami abrasi antara lain: sebagian daerah pantai utara yaitu Kecamatan Sayung, Bonang dan Wedung. Hal tersebut disebabkan kurang mantapnya sistem penyangga pantai, terutama sebagai akibat struktur tanah yang rapuh (*dispers*) serta kurangnya tanaman pelindung pantai di ketiga sebagian kecamatan yang berbatasan dengan laut.

2.1.2 Aspek Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk tahun 2014 di Kabupaten Demak sebanyak 1.106.328 jiwa. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2013 sebanyak 1.094.472 jiwa. Ada peningkatan 11.856 jiwa (1,07%). Menurut kelompok umur sebagian besar penduduk Kabupaten Demak termasuk dalam usia produktif (15-64 th) sebesar 68,19%.

Besar angka ketergantungan Kabupaten Demak adalah 466,39 hal ini berarti setiap 1000 orang berusia produktif menanggung sekitar 466 penduduk di bawah 15 tahun dan diatas 65 tahun.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Demak mencapai 1.218 orang/km². Penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Mranggen dengan tingkat kepadatan 2268 orang/ km², sedangkan wilayah yang paling jarang berada di Kecamatan

Wedung dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 718 orang/km².

b. Fertilitas dan Mortilitas

Selama tahun 2012 di Kabupaten Demak terdapat 16.618 kelahiran, kelahiran tertinggi terjadi di Kecamatan Mranggen sebesar 2.184 kelahiran.

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Reginal Bruto)

Selama Tahun 2010 – 2014 nilai PDRB di Kabupaten Demak mengalami peningkatan yang cukup positif, hal tersebut terlihat pada tahun 2010 nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp 5, 932 Trilyun meningkat secara signifikan menjadi 8,69 Trilyun pada tahun 2014.

Sedangkan pada Tahun 2010 nilai PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar 3,020 Trilyun meningkat menjadi 3, 595 Trilyun pada Tahun 2014.

Pada Tahun 2014 seluruh sektor ekonomi penduduk PDRB naik secara positif dibandingkan Tahun 2013. Pertumbuhan dengan angka tertinggi pada sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor jasa-jasa dan sektor industri.

Tabel 2.2
Distribusi Persentase PDRB
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2011 – 2013

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013
1	Pertanian	44,46	44,00	43,21
2	Pertambangan dan Penggalian	0,20	0,19	0,19
3	Industri	9,67	9,89	10,12
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,93	0,91	0,96
5	Bangunan	5,24	5,26	5,32
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	18,16	18,33	18,51
7	Pengangkutan – Komunikasi	5,01	4,92	5,05
8	Keuangan – Persewaan	4,50	4,51	4,64
9	Jasa – Jasa	11,79	11,98	12,00
	PDRB	100%	100%	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2014

Tabel 2.3
Distribusi Persentase PDRB
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (2000)
Tahun 2011 – 2013

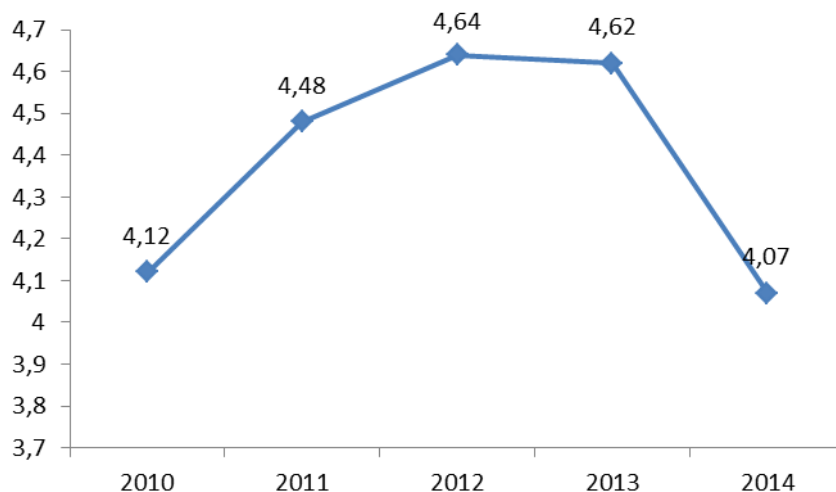
No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013
1	Pertanian	41,31	40,83	40,16
2	Pertambangan dan Penggalian	0,21	0,21	0,20
3	Industri	10,65	10,91	11,19
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,67	0,66	0,68
5	Bangunan	6,40	6,40	6,52
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	20,27	20,34	20,46
7	Pengangkutan – Komunikasi	4,36	4,38	4,42
8	Keuangan – Persewaan	4,09	4,10	4,18
9	Jasa – Jasa	12,04	12,18	12,19
	PDRB	100%	100%	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2014

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan sebagai indikator utama untuk melihat kondisi ekonomi makro daerah, karena memberi cuplikan terhadap kinerja ekonomi makro daerah yang lain. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah semakin berkembang aktifitas perekonomian, baik aspek produksi, konsumsi, investasi maupun perdagangan di daerah, sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi



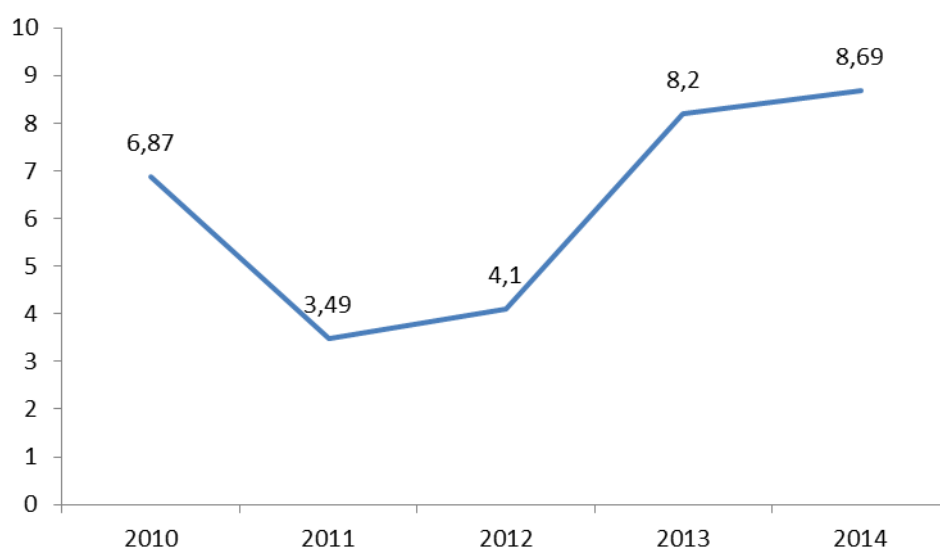
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2015

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak dalam kurun waktu tahun 2010 – 2012 bergerak baik secara berturut-turut 4,12%; 4,48%; 4,64%. Namun pada tahun 2013 – 2014 melambat secara berturut – turut sebesar 4,62% dan 4,07%.

c. Inflasi

Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah, sebagai gambaran singkat harga rata-rata barang kebutuhan masyarakat. Inflasi yang tinggi menunjukkan harga rata-rata barang kebutuhan yang tinggi yang berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat. Laju inflasi dapat menggambarkan pula stabilitas perekonomian daerah. Laju inflasi banyak di pengaruhi oleh perubahan harga yang ditetapkan oleh pemerintah terutama BBM.

Gambar 2.2
Inflasi Kabupaten Demak



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2015

Inflasi di Kabupaten Demak cenderung fluktuatif angka inflasi di Kabupaten Demak pada Tahun 2014 (8,69) meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013 (8,22) kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai indikator pemicu inflasi baik yang bersifat eksternal maupun internal antara

lain disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditas barang terutama bensin dan tarif listrik.

d. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2014 PDRB per kapita di Kabupaten Demak mencapai Rp 7.932.458,- meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp 7.264.534.

Tabel 2.4
PDRB Per Kapita Kabupaten Demak
Tahun 2010 – 2014

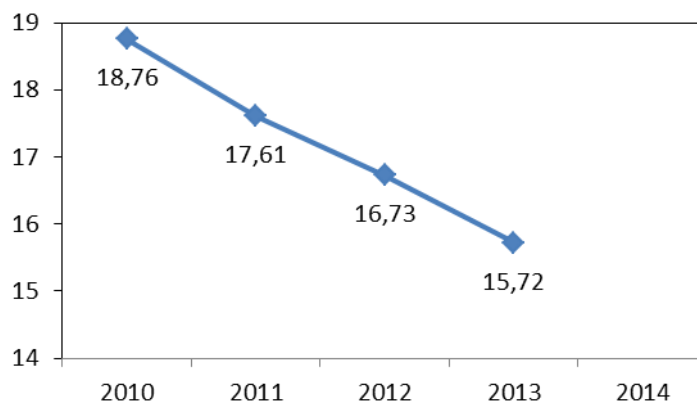
Tahun	PDRB Perkapita
2010	Rp. 5.608.506
2011	Rp. 6.089.266
2012	Rp. 6.222.251
2013	Rp. 7.264.534
2014	Rp. 7.932.458

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2015

e. Kemiskinan

Upaya untuk mengurangi/menurunkan jumlah penduduk miskin di dorong dengan berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang pro rakyat miskin, memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.

Gambar 2.3
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Demak Tahun 2010- 2013



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2014

Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Demak selama kurun waktu 2010 – 2014 cenderung mengalami penurunan, penurunan tersebut berturut-turut sebagai berikut 18,76%; 17,61%; 16,73%; dan 15,72% pada tahun 2013.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur 3 dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan standar kemampuan dasar penduduk yaitu Usia Harapan Hidup, capaian tingkat Pendidikan (Rata-rata lama sekolah, angka melek huruf), serta pengeluaran riil per kapita (daya beli).

Kabupaten Demak untuk tahun 2010-2013 mengalami peningkatan yaitu : 72,58; 73,11; 73,52; 73,85 dan berada di ranking 17 di Propinsi Jawa Tengah.

g. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Pada tahun 2013-2014 capaian APK pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan. APK SD/MI dari 104, 92% meningkat menjadi 105,86%, APK SMP/Mts meningkat dari 91,18% menjadi 94,20%. Adapun APK SMA/MA/SMK (%) mengalami penurunan dari 64,78% menjadi 60,83%.

h. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan perbandingan antara jumlah anak sekolah masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk usia tertentu. Capaian APM di Kabupaten Demak untuk Tahun 2013-2014 sebagai berikut :

- APM SD/MI dari 85,45% meningkat menjadi 91,92%
- APM SMP/Mts dari 77,06% meningkat menjadi 93,44%
- APM SMA/SMK/MA dari 46,86% menjadi 65,99%

APM untuk SMA/SMK/MA relatif masih rendah disebabkan karena setelah lulus memilih untuk bekerja.

i. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kondisi angka kematian ibu melakukan di Kabupaten Demak turun pada Tahun 2013 tercatat 116,47 per 100.000 kelahiran hidup di Tahun 2014 menjadi 81,69 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan derajat kesehatan masyarakat lebih baik.

j. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Periode Tahun 2013-2014 usia harapan hidup di Kabupaten Demak 73,36 tahun pada Tahun 2014 meningkat menjadi 73,85 tahun.

k. Angka Kematian Bayi

Perkembangan kematian bayi di Kabupaten Demak pada Tahun 2013 mencapai 5,09 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada Tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 4,75 per 1.000 kelahiran hidup.

l. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG merupakan Indeks pencapaian kemampuan dasar. Pembangunan Manusia dalam dimensi yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

IPG di Kabupaten Demak pada Tahun 2011 mencapai 69,63% diatas rata-rata propinsi yang mencapai 66,45%. Kabupaten Demak berada di peringkat 10 se- Jawa Tengah

m. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG adalah suatu indikator untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, mencakup keterwakilan perempuan di legislatif, posisi perempuan di tingkat Manajerial, Profesional, Administrasi

dan Teknisi serta Sumbangan perempuan dalam pendapatan. IDG di Kabupaten Demak pada tahun 2011 sebesar 73,09 berada di peringkat ke-15 dan masih di atas rata-rata Propinsi Jawa Tengah sebesar 72,94.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Gambaran kondisi Kabupaten Demak pada aspek pelayanan Umum dijabarkan dalam fokus layanan wajib pilihan.

Urusan Pendidikan

a. Pendidikan Dasar

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Capaian APS Tahun 2011-2014 untuk jenjang SD/MI cenderung naik.

Tabel 2.5
Angka Partisipasi Sekolah

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI (7-12 th)	90,42	90,45	90,45	90,46
2	SMP/MTS (13-15 th)	35,15	35,16	35,2	35,25

Sumber: Penetapan Indikator Kinerja Kab. Demak Tahun 2014

2) Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah menunjukkan jumlah sekolah jenjang pendidikan usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah sudah mampu menampung seluruh penduduk usia sekolah.

Tabel 2.6
Rasio Ketersediaan Sekolah

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah SD/MI	0,05	0,06	0,08	0,08
2	Jumlah SMP/MI	0,02	0,02	0,02	0,02

Sumber: Penetapan Indikator Kinerja Kab. Demak Tahun 2014

3) Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah pendidik dan jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai proses pembelajaran yang berkualitas. Pada periode Tahun 2011-2014 Rasio Guru terhadap murid SD/MI di Kabupaten Demak sebagai berikut

Tabel 2.7
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidik Dasar di Kabupaten Demak Tahun 2011-2014

No	Jenjang Pendidikan	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	SD/MI	0,06	0,06	0,07	0,07
2	SMP/Mts	0,04	0,05	0,09	0,1

Sumber: Penetapan Indikator Kinerja Kab. Demak Tahun 2014

4) Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah perbandingan antara jumlah guru per kelas dengan jumlah murid dalam satuan pendidikan tertentu.

Tabel 2.8
Rasio Guru dan Murid per Kelas Rata-Rata Jenjang SD/MI dan SMP/Mts

No	Pendidikan	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI	0,06	0,06	0,07	0,07
2	SMP/MTS	0,04	0,05	0,09	0,1

Sumber: Penetapan Indikator Kinerja Kab. Demak Tahun 2014

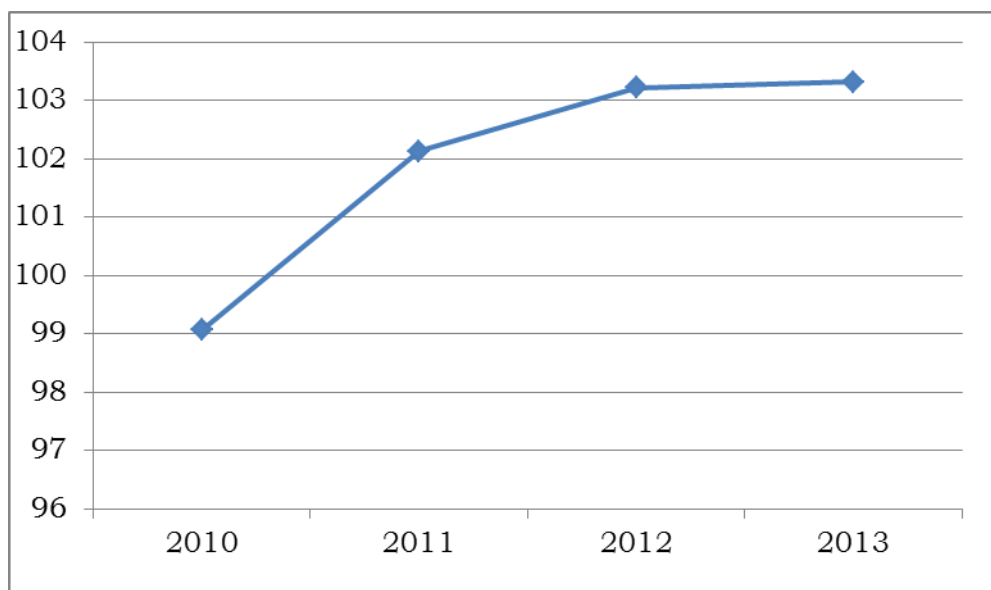
2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah

1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai tukar petani adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi

rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi hasil pertanian. NTP dihitung berdasarkan perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dalam persen. Semakin tinggi nilai NTP, maka relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan dan daya beli petani. Perkembangan NTP di Kabupaten Demak tahun 2010 – 2013 dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut.

Gambar 2.4
Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Demak
Tahun 2010-2013



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2014

2. Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Kondisi panjang jalan yang ada di wilayah Kabupaten Demak apabila dibandingkan dengan jumlah kendaraan, maka dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun rasionya semakin kecil. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Demak jumlahnya semakin meningkat. Walaupun pada tahun 2011 terjadi penurunan jumlah kendaraan dari tahun 2010. Selengkapny rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan di Kabupaten Demak dapat dilihat dari tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan di
Kabupaten Demak tahun 2010-2013

Tahun	Panjang Jalan (Km)	Banyak Kendaraan (Unit)	Ratio(%)
2010	426,51	56.044	76,10
2011	426,51	54.441	78,34
2012	426,51	66.357	64,28
2013	426,51	68.684	62,10

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2014

3. Sumber Daya Manusia

a. Rasio
Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang belum produktif (usia < 14 tahun) dan tidak produktif (usia > 64 tahun) dengan jumlah penduduk produktif (usia 14 - 64 tahun). Rasio Ketergantungan di wilayah Kabupaten Demak dalam kurun waktu 2010-2012 terus menurun. Hal ini menunjukkan kecenderungan yang semakin baik. Makin kecil rasio ketergantungan berarti makin kecil beban tanggungan bagi kelompok usia produktif. Data seara rinci dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10
Rasio Ketergantungan Kabupaten Demak Tahun 2010 - 2013

No.	Bidang Urusan/Indikator	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Rasio Ketergantungan (%)	49,2	48,87	48,45	48,02
2	Penduduk usia 0-14 tahun	296.321	297.085	297.295	297.219
3	Penduduk usia 15-64 tahun	708.999	718.946	729.175	739.411
4	Penduduk usia 65+ tahun	52.501	54.247	56.002	57.842

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2014

b. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama kurun waktu 2011-2013, sektor pertanian memberikan kontribusi paling tinggi dan diikuti sektor perdagangan dan lainnya. Namun, dari tahun ke tahun jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian terus mengalami penurunan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Demak Tahun 2011-2013

No	Lapangan Usaha	Jumlah Penduduk yang Bekerja		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	227.820	175.454	152.335
2	Industri Pengolahan	52.059	59.985	58.190
3	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	92.977	108.745	125.078
4	Jasa Kemasyarakatan	60.599	67.343	80.728
5	Lainnya (pertambangan, Listrik, Gas dan Air, Konstruksi, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estantedn Usaha Persewaan)	72.379	82.220	76.838

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2014

c. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Penduduk di Kabupaten Demak masih didominasi oleh pendidikan rendah yaitu Sekolah Dasar ke bawah dan Sekolah Menengah Pertama. Namun, kualitas sumber daya manusia sudah menunjukkan peningkatan dengan ditandainya jumlah penduduk berpendidikan tinggi yang meningkat dari tahun 2010 sebesar 17.337 menjadi 25.313 pada tahun 2012, sebagaimana terlihat pada tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Demak Tahun 2010 - 2013

No	Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Belum Pernah Sekolah	48.772	51.552	53.834	54.415
2	Tidak Punya	100.037	154.555	148.232	153.701
3	SD/MI/Sederajat	359.258	310.660	305.380	313.510
4	SMP/MTs/Sederajat	200.508	184.292	189.701	183.786
5	SMA/MA/Sederajat	120.951	108.572	116.424	123.016
6	SM Kejuruan	5.304	22.127	25.796	24.028
7	Diploma I/II	4.787	3.356	6.197	2.769
8	Diploma III/Akademi	6.724	8.726	5.426	6.915
9	Diploma IV/S1/S2/S3	17.337	24.390	25.313	17.696

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2014

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RKPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 DAN REALISASI RPJMD KABUPATEN DEMAK 2011-2016.

2.2.1. Urusan Wajib

1) Urusan Pendidikan

Berdasarkan capaian kinerja, terlihat Angka Partisipasi Sekolah Dasar Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2013/2014 cukup realistis. Namun demikian capaian APM tersebut masih di bawah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yaitu APM SD/MI sebesar 96,1%. Pada pendidikan menengah semua indikator kinerja sudah mencapai target yang dicanangkan. Capaian kinerja pelayanan umum urusan pendidikan di Kabupaten Demak Tahun 2013 - 2014 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Pendidikan Dasar							
	Angka partisipasi sekolah	90,44	90,45	100,01	90,45	90,46	100,01	☺
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	0,07	0,08	114,29	0,08	0,08	100,00	☺
	Rasio guru/murid	0,07	0,07	100,00	0,07	0,07	100,00	☺
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	0,07	0,07	100,00	0,07	0,07	100,00	☺
2.	Pendidikan menengah:							
	Angka partisipasi sekolah	35,19	35,2	100,03	35,2	35,25	100,14	☺
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	0,02	0,02	100,00	0,02	0,02	100,00	☺
	Rasio guru terhadap murid	0,08	0,09	112,50	0,09	0,1	111,11	☺
	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	0,08	0,09	112,50	0,09	0,1	111,11	☺
	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	100	99,09	99,09	100	99,25	99,25	☺
3.	Fasilitas Pendidikan:							
	Ruang kelas SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%)	60,25	60,25	100,00	60,25	60,26	100,02	☺
4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):							
	Pendidikan Anak Usia Dini (Formal) (%)	33,92	33,93	100,03	33,95	33,68	99,20	☺
	Pendidikan Anak Usia Dini (Non Formal) (%)	30,50	30,55	100,16	30,60	44,82	146,47	☺
	Pembinaan PAUD (wilayah kecamatan)	14		0,00	14	14	100,00	☺
5.	Angka Putus Sekolah:							
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,09	0,09	100,00	0,08	0,07	87,50	▶

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,61	0,06	9,84	0,6	0,5	83,33	►
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,63	0,6	95,24	0,6	0,5	83,33	►
6.	Angka Kelulusan:							
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,52	100	100,48	99,54	100%	1,00	▼
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,85	99,77	99,92	99,86	99,8	99,94	●
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	98,62	99,98	101,38	98,62	99,98	101,38	●
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99%	94,35	9530,30	99%	99,1	10010,10	●
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	74,86	72,6	96,98	74,86	75,25	100,52	●
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85%	85%	100,00	85%	92%	108,24	●

Sumber :Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
 ► : Akan tercapai
 ▼ : Perlu perhatian / upaya keras

2) Kesehatan

Masyarakat yang sehat merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan dalam bidang kesehatan, yaitu kondisi dimana individu, keluarga, masyarakat Kabupaten Demak tidak mengalami gangguan penyakit yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik secara jasmani, rohani dan sosial.

Selain memiliki masyarakat yang sehat, diharapkan masyarakat Kabupaten Demak juga mandiri dalam arti individu, keluarga, dan masyarakat Kabupaten Demak mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat baik dalam pembiayaan kesehatan maupun pemanfaatan fasilitas kesehatan. Dalam mencapai

tujuan tersebut adapun capaian kinerja pelayanan umum urusan kesehatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan
di Kabupaten Demak Tahun 2013- 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Rasio posyandu per satuan balita	13,41		0,00	13,34		0,00	▼
2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,0002 31553		0,00	0,0002 29943		0,00	▼
3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0000 028		0,00	0,0000 036		0,00	▼
4.	Rasio dokter per satuan penduduk	0,0003 133	15	4787743 ,38	0,0003 248		0,00	▼
5.	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk	0,0006 708		0,00	0,0006 844		0,00	▼
6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	90,01	100	111,10	92,99		0,00	▼
7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	95,20	41,3	43,38	95,30		0,00	▼
8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization/ UCI (%)	50	51,41	102,82	1	100	10000,0 0	●
9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100		0,00	100	100	100,00	●
10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100,00	100	100	100,00	●
11.	Cakupan penemuan dan	74,00	100	135,14	76,00	100	131,58	●

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	penanganan penderita penyakit DBD							
12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin							
	Dari Dinkes	100	100	100,00	100	100	100,00	●
	Dari RSUD	6,47	9,115	140,88	6,59	25,871	392,58	●
13.	Cakupan kunjungan bayi	100	100	100,00	100	100	100,00	●
14.	Cakupan puskesmas	99,40	100	100,60	99,50	100	100,50	●
15.	Cakupan pembantu puskesmas	100	100	100,00	100	100	100,00	●
16.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)	97,00	40,63	41,89	97,56	100	102,50	●
17.	Cakupan Pelayanan Nifas (%)	100	8.832	8832,00	100	100	100,00	●
18.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	93,01	636	683,80	96,00	100	104,17	●
19.	Cakupan Pelayanan anak balita (%)	0,90	4	444,44	0,90	100	11111,11	●
20.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)	100	100	100,00	100	100	100,00	●
21.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	100	100	100,00	100	100	100,00	●
22.	Cakupan peserta KB aktif (%)	78,00		0,00	79,00		0,00	▼
23.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit (%)	100	100	100,00	100	100	100,00	●
24.	Cakupan yankesdas masyarakat miskin (%)	100	100	100,00	100	100	100,00	●
25.	Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan	100	100	100,00	100	100	100,00	●

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)							
26.	Cakupan desa siaga aktif (%)	60,00	249	415,00	70,00	100	142,86	●
27.	Cakupan Penderita HIV/AIDS yang ditangani (%)	100	100	100,00	100	100	100,00	●
28.	Penderita DBD yang ditangani (%)	100	364	364,00	100	100	100,00	●
29.	Kasus malaria yang ditemukan dan diobati sesuai prosedur (%)	100	100	100,00	100	100	100,00	●
30.	Cakupan kunjungan (orang)	69,65	83,813	120,33	73,14		0,00	▼
31.	Bed Occupancy Rate/BOR (hari)	73,7	73,94	100,33	75,9		0,00	▼
32.	Average Length of Stay/AvLOS (hari)	4,16	4,54	109,13	4,26		0,00	▼
33.	Turn Over Interval TOI (hari)	1,7	1,3	76,47	1,5		0,00	▼
34.	BTO (kali)	73	72,73	99,63	74,46		0,00	▼
35.	Net Death Rate /NDR (%)	20	14,74	73,70	19		0,00	▼
37.	Maternal Death Rate (%)	0	0		0			
38.	Neonatal Death Rate (%)	0,02	4,98	24900,00	0,02		0,00	▼
39.	Kepuasan pelanggan (%)	≥88	85,24		≥89		0,00	▼

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

3) Pekerjaan Umum

Urusan sarana-prasarana (infrastruktur/pekerjaan umum) memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi antar kelompok masyarakat.

Peningkatan kualitas infrastruktur, terutama jalan, jembatan, irigasi dan pasar memiliki fungsi sebagai penggerak

pertumbuhan ekonomi daerah yang memungkinkan orang, barang dan jasa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, serta mendorong produksi dan distribusi komoditi ekonomi, sehingga sangat mendukung daya saing ekonomi daerah. Selain itu penyediaan air bersih dan pembangunan sanitasi yang memadai sangat diperlukan mengingat wilayah Kabupaten Demak masih sangat potensial rawan kekeringan.

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum di Kabupaten Demak Tahun 2013 - 2014 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum
di Kabupaten Demak Tahun 2013 - 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	71,02	75,40	106,17	80,92	87,45	108,07	☉
2.	Rasio Jaringan Irigasi	0,5716	0,5775	101,03	0,5917	0,6020	101,74	☉
3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,00471	0,0006944	14,74	0,00475	0,0006944	14,62	▼
6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,242	0,620	256,20	0,266		0,00	▼
6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,242	0,620	256,20	0,266		0,00	▼
8.	Rasio permukiman layak huni	0,5212	0,5312	101,92	0,5440		0,00	▼
9.	Panjang jalan dilalui Roda 4	0,3150	0,355	112,70	0,3464		0,00	▼
10.	Jalan Penghubung dari ibukota kec.ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) (%)	789,98	789,98	100,00	789,98	789,98	100,00	☉
11.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	71,02	75,4	106,17	80,92	87,45	108,07	☉

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
12.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	6.083	6,499	0,11	6.130	6,721	0,11	▼
13.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (%)	1,71	1,71	100,00	1,71	1,53	89,47	►
14.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	14,20	13,1	92,25	13,50	12,7	94,07	●
15.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	46,07	50,02	108,57	48,00		0,00	▼
16.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (%)	12,50	0	0,00	12,50		0,00	▼
17.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	57,18	87,17	152,45	59,19		0,00	▼
18.	Lingkungan Pemukiman (%)	1,10		0,00	1,03		0,00	▼
19.	Jml pembangunan infrastruktur kelurahan (paket)	6	6	100,00	6		0,00	▼
20.	Jml pembangunan infrastruktur antar desa (paket)	14	14	100,00	14	14	100,00	●

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
► : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

4) Perumahan

Pembangunan urusan perumahan rakyat diarahkan agar masyarakat dapat menempati rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. Untuk itu pemerintah daerah memberikan prioritas kepada program bedah rumah bagi kelompok masyarakat miskin serta program air bersih dan sanitasi yang memadai untuk masyarakat.

Capaian kinerja urusan perumahan di Kabupaten Demak Tahun 2013 - 2014 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Urusan Perumahan
di Kabupaten Demak Tahun 2013 - 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	18,41		0,00	19,22		0,00	▼
2.	Rumah tangga pengguna listrik (%)	47,38		0,00	49,44		0,00	▼
3.	Rumah tangga ber-Sanitasi (%)	25,23		0,00	26,33		0,00	▼
4.	Lingkungan pemukiman kumuh (%)	2,48		0,00	2,38		0,00	▼
5.	Rumah layak huni (%)	38,96		0,00	40,66		0,00	▼

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

5) Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang merupakan landasan atau acuan kebijakan bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis dan berkelanjutan. Program Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan ini bertujuan: menyerasikan peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait, harmonisasi pembangunan penataan ruang antar wilayah, mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan

berkelanjutan dan keseimbangan antar fungsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, mewujudkan sistem kelembagaan penataan ruang yang dapat meningkatkan koordinasi dan konsultasi antar pihak, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui pengakuan hukum pertanahan yang adil dan transparan secara konsisten, melanjutkan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dengan memperhatikan kepentingan rakyat.

Capaian kinerja urusan penataan ruang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang
di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,0206		0,00	0,0215		0,00	▼
2.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,922		0,00	0,922		0,00	▼
3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)	-			-			
4.	Tingkat ketersediaan dokumen rencana tata ruang (%)	69,57	60	86,24	78,26	78,26	100,00	●
5.	Tingkat ketersediaan dokumen pengendalian tata ruang (%)	100	100	100,00	100	100	100,00	●

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

6) Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan ini bertujuan untuk mengembangkan pola perencanaan pembangunan daerah yang mampu menjawab prioritas daerah, mengantisipasi perubahan yang ada dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui mekanisme Musrenbang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, utamanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berikut peraturan turunannya.

Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	☉
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	☉
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	☉
4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	☉
5.	Tingkat ketersediaan data/informasi bagi penyusunan rencana pembangunan daerah (%)	38,46	40	104,00	58,97	58,97	100,00	☉
6.	Tingkat penyelenggaraan bintek/pelatihan/sosialisasi perencanaan (%)	40,00	40	100,00	60,00	60	100,00	☉
7.	Tingkat ketersediaan dokumen rencana & evaluasi pembangunan daerah (%)	38,10	50	131,23	56,55	63,63%	1,13	▼
8.	Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan ekonomi (%)	44,83	50	111,53	65,52	65,52	100,00	☉

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
9	Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan sosbud (%)	55,00	50	90,91	70,00	70	100,00	☉
10.	Tingkat ketersediaan dokumen kerjasama pembangunan daerah (%)	40,48	50	123,52	59,52	59,52	100,00	☉
11.	Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan perkotaan (%)	56,25	45	80,00	68,75	68,75	100,00	☉
12.	Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan prasarana wilayah & SDA (%)	57,14	45	78,75	71,43	71,43	100,00	☉
13.	Tingkat ketersediaan dokumen rencana pengembangan wilayah perbatasan (%)	33,33	30	90,01	55,56		0,00	▼
14.	Tingkat ketersediaan dokumen rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (%)	47,06	50	106,25	64,71		0,00	▼
15.	Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan daerah rawan bencana	50	87,50	71,43	71,43	100,00		☉
16.	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2010	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	☉
17.	Jml kerjasama dengan daerah lain (MoU)	2		0,00	2		0,00	▼
18.	Jml Rencana Pembangunan Kecamatan yang tersusun (dok)	14	14	100,00	14	14	100,00	☉
19.	Jml Rencana Kerja Kelurahan yang tersusun (dok)	6	6	100,00	6	6	100,00	☉

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ☉ : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

7) Perhubungan

Pembangunan di bidang perhubungan diarahkan pada upaya untuk menjamin peningkatan penyediaan aksesibilitas transportasi angkutan jalan, terutama terkait dengan jaringan pelayanan, jaringan prasarana, keselamatan, dan sumber daya manusia.

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi diprioritaskan dalam rangka menopang peran perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan transportasi untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, terutama mendukung pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu sentra-sentra produksi pertanian, sentra-sentra produksi perikanan, sentra-sentra industri dan UMKM, serta daerah wisata.

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
di Kabupaten Demak Tahun 2013 - 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	5.107.497	2.483.108	48,62	5.158.572	2.671.150	51,78	▼
2.	Rasio ijin trayek	0,00038	0,00038	100,00	0,00038	0,00038	100,00	●
3.	Jumlah uji kir angkutan umum	7,166	6.345	88543,12	7,461	8.275	110910,07	●
4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	2	2	100,00	2	2	100,00	●
5.	Angkutan darat (%)	0,14	0,11	78,57	0,14	0,12	85,71	▶
6.	Kepemilikan KIR angkutan umum (%)	4,17	2,25	53,96	4,17	3,15	75,54	▼
7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)	10	10	100,00	10	10	100,00	●
8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	32	23.500	73437,50	32	32.000	100000,00	●
9.	Pemasangan Rambu-rambu (%)	40,00	44,5	111,25	60,00	71	118,33	●

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

8) Lingkungan Hidup

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak harus memperhatikan aspek keberlanjutan (*sustainability*). Di antara faktor penting bagi adanya keberlanjutan adalah berkaitan dengan lingkungan hidup. Di Kabupaten Demak masalah lingkungan hidup

menjadi isu yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang sebagian besar memanfaatkan sumber-sumber alam yang ada. Sektor yang berkaitan dengan pertanian, seperti perkebunan, pertambangan, dan perikanan, misalnya, jelas sangat tergantung padamasalah lingkungan. Ketika kualitas lingkungan mengalami penurunan, kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam itu juga akan mengalami penurunan.

Lingkungan juga terkait dengan kepentingan ekologi, seperti ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati dan mempengaruhi perubahan cuaca. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam itu tidak hanya untuk kepentingan sesaat dan jangka pendek, melainkan untuk kelangsunganalam itu sendiri dan kelangsungan pemanfaatannya oleh generasi berikutnya.

Dalam rangka penanganan pelestarian lingkungan dan upaya rencana pengelolaan Lingkungan Hidup disesuaikan dengan jenis kebijakan yang harus ditempuh. Program dan kegiatan pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam usaha melestarikan Lingkungan sebagai perwujudan pelayanan kepada masyarakat menunjukkan hasil - hasil yang dicapai, realisasi fisik tahun anggaran 2014 sebesar 100 %, sedangkan penggunaan anggaran tahun 2014 sebesar 96.80 %. Hal ini disebabkan adanya sisa pagu dari nilai kontrak pihak ketiga. Adapun capaian kinerja urusan lingkungan hidup sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.20

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Persentase penanganan sampah (%)	72,17		0,00	72,30		0,00	▼
2.	Persentase Penduduk berakses air minum (%)	14,38		0,00	14,44		0,00	▼

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
3.	Persentase Luas pemukiman yang tertata %	60,45		0,00	60,48		0,00	▼
4.	Pencemaran status mutu air (%)	20	73,75	368,75	20	93,75	468,75	●
5.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (%)	18,65	54,91	294,42	21,03	75,94	361,10	●
6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. (%)	20	37	185,00	20	48	240,00	●
7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	0,0256		0,00	0,0281		0,00	▼
8.	Penegakan hukum lingkungan (%)	20	36	180,00	20	48	240,00	●
9.	Meningkatnya kebersihan pasar (%)	100	100	100,00	100	100	100,00	●

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

9) Pertanahan

Tanah merupakan sumber daya yang penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia yang sangat mendasar. Pengelolaan pertanahan yang adil dan memperhatikan kearifan lokal diperlukan untuk mendukung keseluruhan elemen pelaksanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pembangunan di bidang pertanahan dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan pertanahan, meningkatkan bidang-bidang tanah yang

didaftarkan/ disertifikatkan, mewujudkan pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertanahan yang mendasarkan pada RTRW dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan lahan, meningkatkan kualitas dan kuantitas tertib administrasi pertanahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik dalam rangka mengendalikan pemanfaatan lahan secara merata dan berkeadilan, mengendalikan konversi lahan pertanian ke non pertanian.

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	0	233.999		-			
2.	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	100	100	100,00	100		0,00	▼
3.	Penyelesaian izin lokasi (%)	98,18	146	148,71	98,18		0,00	▼

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

10) Kependudukan dan Catatan Sipil

Pembangunan di bidang kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan dalam rangka meningkatnya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil, serta mewujudkan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) / e-KTP.

Tahun 2014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 4 program 21 kegiatan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 3.023.076.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.805.702.552,- atau 92,8% Disamping melaksanakan anggaran dari APBD Kabupaten dan melaksanakan anggaran APBNP Tahun 2014 melalui Tugas Pembantuan dengan dasar hukum Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak adalah DIPA Nomor : SP DIPA - 010.08.4.030329/2014 tanggal 25 September 2014.

Program yang dilaksanakan dalam Tugas Pembantuan APBNP 2014 adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan, sedangkan kegiatannya adalah Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu. Pelaksanaan dimulai bulan Oktober 2014 dan berakhir 31 Desember 2014. Adapun capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
di Kabupaten Demak Tahun 2013 - 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,997	0,7	70,21	0,995	0,79	79,40	▶
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	1,353	1	73,91	1,3810	1,00	72,41	▼
3.	Rasio pasangan berakte nikah	0,599	1	166,94	0,606	1,00	165,02	●
4.	Kepemilikan KTP (%)	99,95	70,89	70,93	99,96	78,55	78,58	▶
5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	61,95	50,16	80,97	62,33	80,19	128,65	●
6.	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	●
7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	●

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai

▼ : Perlu perhatian / upaya keras

11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada upaya agar perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan, yang meliputi; penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Disamping itu juga diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dan penghapusan eksploitasi seksual pada anak dan remaja.

Capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
di Kabupaten Demak Tahun 2013 - 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	2,2	2,02	91,82	2,3	2,3	100,00	●
2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	58	59,70	102,93	59	64,9	110,00	●
3.	Rasio KDRT	0,009	0,008	88,89	0,008	0,01	125,00	●
4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	7,00	8,20	117,14	6,50	1,7	26,15	▼
5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	57	91,38	160,32	58	93,3	160,86	●
6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan	31	40,00	129,03	33	36	109,09	●

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)							
7.	Kontribusi Perempuan dalam pekerjaan upahan disektor non pertanian (%)	41,2	37,50	91,02	41,4	39,8	96,14	☺
8.	Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada pendidikan dasar (%)	96,0	103,20	107,50	97,0	99,54	102,62	☺
9.	Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada pendidikan menengah (%)	103	100,00	97,09	102	97,01	95,11	☺
10.	Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada perguruan tinggi (%)	92	87,77	95,40	94	107,8	114,68	☺
11	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun (%)	100,6	99,62	99,03	100,4	96,5	96,12	☺
12.	Persentase perempuan di lembaga legislatif (%)	18	18,00	100,00	30	14	46,67	▼
13	Rasio kekerasan terhadap anak (%)	0,008	0,012	150,00	0,007	0,017	242,86	☺
14	Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di RS (%)	100	100	100,00	100	100	100,00	☺
16	Cakupan petugas pembimbing rohani yang terlatih dalam melakukan	100	100	100,00	100	100	100,00	☺

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	bimbingan rohani di unit pelayanan terpadu (%)							
17	Jml PKK aktif							
	- PKK Kecamatan	14	14	100,00	14	14	100,00	☉
	- PKK Desa/Kelurahan	249	249	100,00	249	249	100,00	☉

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ☉ : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pembangunan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dilaksanakan melalui pengendalian kuantitas penduduk, terutama berfokus pada revitalisasi program KB melalui: (a) pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk yang responsif gender; (b) pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana; (c) promosi dan penggerakan masyarakat; (d) peningkatan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi; (e) pelatihan dan pengembangan program kependudukan dan KB; dan (f) peningkatan kualitas manajemen program.

Capaian kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,14	2,30	107,48	2,12	2,26	106,60	☉
2.	Rasio akseptor KB (%)	75,24	75,98	100,98	753,60	76,74	10,18	▼
3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	75,24	76,15	101,21	75,36	76,74	101,83	☉
4.	Keluarga Pra	59,63	58,85	98,69	58,67	46,55	79,34	▶

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)							
5.	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Keluarga Miskin dan Rentan (%)	75,02	87	115,97	75,12	75,54	100,56	☉
6.	Menurunnya TFR	2,14	2,3	107,48	2,12	2,26	106,60	☉
7.	Meningkatnya partisipasi peserta KB mandiri terhadap peserta aktif (%)	45,36	52,6	115,96	45,46	58,29	128,22	☉
8.	Meningkatnya peserta KB Pria (%)	1,82	32,26	1772,53	1,89	10,16	537,57	☉
9	Menurunnya persentase Unmetneed (%)	9,74	8,37	85,93	9,65	8,34	86,42	▶
10.	Terbentuknya PIK - KRR	18	18	100,00	20	67	335,00	☉
11.	Cakupan Catur Bina (%):							
	- BKB	56,96	58,77	103,18	57,57	56,36	97,90	☉
	- BKR	22,63	35,80	158,20	23,09	42,57	184,37	☉
	- BKL	22,63	31,56	139,46	23,09	31,6	136,86	☉
	- BLK	5,62	6,2	110,32	9,64	9,87	102,39	☉
12.	Drop Out Keluarga Berencana (DO KB) - %	12,15	13,37	110,04	11,42	13,72	120,14	☉

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ☉ : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

13) Sosial

Pembangunan di bidang sosial diarahkan pada upaya menjamin akses penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang sosial antara lain berupa: pemberian bantuan sosial bagi PMKS, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial, penyediaan sarana prasarana panti sosial, penyediaan sarana prasarana

pelayanan luar panti, bantuan sosial bagi korban bencana, pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial, dan penyelenggaraan jaminan sosial.

Capaian kinerja urusan sosial sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Sosial
di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ke t.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Sarana sosial seperti:							
	- Panti Asuhan	38	38	100,00	38	38	100,00	●
	- Panti Jompo	1	1	100,00	1	1	100,00	●
	- Panti Rehabilitasi	3	3	100,00	3	3	100,00	●
	- Panti Rehabilitasi cacat	1	1	100,00	1	1	100,00	●
2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)	8,65%	9,46	10936,42	9,05%		0,00	▼
3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	9,69%	16,12	16635,71	9,78%		0,00	▼
4.	Prosentase Panti Sosial yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial (%)	46,51 %	60,47	13001,51	58,14 %		0,00	▼
5.	Prosentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	69,77 %	74,42	10666,48	76,74 %		0,00	▼
6.	Tersedianya dana APBD Kab. untuk jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental (Cacat ganda), serta	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	●

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	lanjut usia tidak potensial (Ada/ Tidak)							
7.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,00471	0,0006944	14,74	0,00476	0,0006944	14,59	▼
8.	Jumlah petugas yang mendampingi pelaksanaan ibadah haji	12	7	58,33	12	7	58,33	▼
9.	Jumlah guru TPQ yang mendapat pembinaan (org)	500	573	114,60	550	573	104,18	●
10.	Jumlah guru Madin yang mendapat pembinaan (org)	650	1141	175,54	650	1141	175,54	●
11.	Jumlah TPQ/Madin yang mendapat bantuan (unit)	1200	1684	140,33	1400	1684	120,29	●
12.	Jumlah tempat peribadatan yang mendapat bantuan (unit)	200	400	200,00	225	0	0,00	▼
13.	Jumlah bantuan kepada LPTQ (Rp juta)	65	50	76,92	70	0	0,00	▼
14	Fasilitasi forum ulama-umaro' (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak	Ada	●

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

14) Ketenagakerjaan

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan pelatihan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pelayanan kepesertaan jamsostek, pelayanan pengawasan ketenagakerjaan.

Capaian kinerja urusan ketenagakerjaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	72,88	71,35	97,90	73,28		0,00	▼
2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)	0,64	3,11	485,94	0,64		0,00	▼
3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	72,04	71,09	98,68	72,69		0,00	▼
4.	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	38,52	26,77	69,50	38,92	42,7	109,71	●
5.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,31	7,98	150,28	5,26		0,00	▼
6.	Keselamatan dan perlindungan (%)	41,49	41,45	99,90	45,11		0,00	▼
7.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	66,67	31,58	47,37	66,67		0,00	▼
8.	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi/ masyarakat	80,00	78,02	97,53	85,75		0,00	▼
9.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi program Jamsostek	50,68	68,30	134,77	51,19	54,33	106,13	●
10.	Pengawasan Ketenagakerjaan Besaran pemeriksaan Perusahaan	25,53	36,27	142,07	29,79	28,37	95,23	●
11.	Upah Minimum Kabupaten / UMK (Rp ribu)	1.020,38	995,00	98	1.075,43	1.280,00	119	▼

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
12.	Kebutuhan Hidup Layak / KHL (Rp ribu)	1.020,38	1.278,67	125	1.075,43	1463,358	136	●
13.	Rasio pencapaian KHL (%)	100	99,41	99,41	100	106,25	106,25	●

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

15) Koperasi dan UKM

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan di bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi di Kabupaten Demak adalah kemandirian ekonomi dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dalam hal ini pemberdayaan Koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (*pro poor*). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi daerah (*pro growth*), terutama pada masa-masa terjadinya guncangan ekonomi regional, nasional dan global koperasi dan UMKM telah terbukti memperlihatkan immunitasnya.

Pendekatan pembangunan di Kabupaten Demak yang menempatkan industri, koperasi dan UMKM sebagai salah satu sektor unggulan daerah mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi daerah lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi daerah yang kokoh dan mandiri.

Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian daerah, keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal bahwa Koperasi dan UMKM merupakan pelopor (*leader*) tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi daerah juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*).

Capaian kinerja urusan koperasi dan UKM sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM
di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Persentase Koperasi Aktif (%)	68,00	78,71	115,75	70,00	79,10	113,00	●
2.	Jumlah UKM non BPR / LKM UKM (unit)	678	652	96,17	692	652	94,22	●
3.	Jumlah BPR/LKM (unit)	42	42	100,00	42	42	100,00	●
4.	Usaha Mikro dan Kecil (%)	316,00	320,00	101,27	317,00	318,5	100,47	●
5.	Meningkatnya Omset Penjualan UMKM (%)	11,00	5,40	49,09	13,00	6,2	47,69	▼
6.	Jumlah UMKM Pengakses	1,265	1	79,05	1,297		0,00	▼

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Program Kredit Pemberdayaan UMKM							
7.	Jml kecamatan yang melaksanakan pengembangan UKM Sektor Unggulan (kec)	14	14	100,00	14	14	100,00	●

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

16) Penanaman Modal

Pembangunan di bidang penanaman modal diarahkan pada upaya untuk peningkatan pelayanan terkait dengan kebijakan penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak secara terus menerus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, BPPTPM Kabupaten Demak pada bulan April dan bulan Juli 2014 telah melaksanakan surveillance audit internal dan di bulan September 2014 telah memperoleh Surat Keterangan perpanjangan berkala tahunan sertifikat sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 pada tanggal 23 November 2014 dan dinyatakan lulus Sertifikat tersebut menunjukkan adanya pengakuan penerapan pelayanan perizinan di BPPTPM Kabupaten Demak telah memenuhi standar internasional. Sertifikat ISO 9001:2008 dikeluarkan Worldwide Quality Assurance Limited-United Kingdom (WQA-UK). Adapun capaian kinerja urusan penanaman modal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	40		0,00	50		0,00	▼
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp 000.000)	7.780.718		0,00	913,299		0,00	▼
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	3,769		0,00	3,769		0,00	▼
4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)		-			-		-

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

17) Kebudayaan

Pembangunan di bidang kebudayaan diarahkan pada upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni budaya berupa kajian seni budaya, fasilitasi seni budaya, gelar seni seni budaya dan misi kebudayaan. Di samping itu pembangunan kebudayaan juga diarahkan pada upaya peningkatan sarana dan prasarana seni budaya yang mencakup aspek sumber daya manusia, tempat, dan organisasi. Capaian kinerja urusan kebudayaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	8		0,00	8		0,00	▼
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	0			0			-
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100		0,00	100		0,00	▼

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

18) Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan di bidang kepemudaan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah, meningkatkan rasa kebangsaan generasi muda, meningkatkan daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif, meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan/ organisasi kepemudaan. Sedang pembangunan di bidang olahraga diarahkan untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, baik olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi. Dalam rangka peningkatan layanan pendidikan perlu adanya manajemen pelayanan pendidikan berorientasi pada upaya peningkatan layanan pendidikan kepada pengguna layanan (*client*) dengan menerapkan prinsip-prinsip tata layanan yang baik (*good governance*).

Maka penyelenggaraan layanan pendidikan perlu dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel, accountable*) di tingkat pengelola

layanan pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga.

Secara khusus, manajemen pelayanan pendidikan di tingkat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengacu pada hasil kajian Rencana Pengembangan Kapasitas (*Capacity Development Plan*) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak dari 5 bidang urusan pelayanan diantaranya yaitu mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan fasilitas dan pengembangan generasi .

Strategi yang diperlukan guna meningkatnya kinerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga di masa mendatang antara lain dengan Peningkatkan pemerataan akses Olahraga terhadap generasi muda, Pelajar dan masyarakat.

Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Jumlah organisasi pemuda	20	21	105,00	23	24	104,35	●
2.	Jumlah organisasi olahraga	83	84	101,20	90	91	101,11	●
3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	15	16	106,67	17	18	105,88	●
4.	Jumlah kegiatan olahraga	15	17	113,33	18	19	105,56	●
5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	1	1	100,00	1	1	100,00	●
6.	Lapangan olahraga	280	281	100,36	282	283	100,35	●
7.	Jml karangtaruna yang aktif (desa/kelurahan)	249	249	100,00	249	100	40,16	▼
8.	Jml kecamatan yang menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan pemuda (kec)	14	14	100,00	14	14	100,00	●

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
 ► : Akan tercapai
 ▼ : Perlu perhatian / upaya keras

19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diarahkan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta pencegahan tindak kriminal, meningkatkan wawasan kebangsaan dan persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan upaya pemberantasan penyalahgunaan napza, miras, dan penyakit masyarakat (pekat) lainnya, meningkatkan kemampuan Linmas dan Ratih terhadap bahaya/ancaman gangguan kamtibmas, serta meningkatkan pendidikan politik dan demokrasi masyarakat.

Capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
di Kabupaten Demak Tahun 2013 - 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	25	20	80,00	30	30	100,00	●
2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	38	38	100,00	38	38	100,00	●
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan (%)	80%	44,92%	56,15	80%	78,01%	97,51	●
4	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih	400	376,883	94,22	1	647,002	64700,20	●
5	Jumlah DPT	800	839,022	104,88	1	829,368	82936,80	●
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan (%)				1	71,23%		▼
	Jumlah				1	597,302		▼

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	pemilih yang menggunakan hak pilih							
	Jumlah PDP				1	838,514		▼
6	Jumlah parpol yang mendapat kursi di DPR per jumlah Parpol peserta Pemilu (%)	34,29%	100%	291,63	34,29%	218%	635,75	●
7	Jumlah parpol yang mendapat kursi di DPR	12	12	100,00	12	9	75,00	▼
8	Jumlah Parpol peserta Pemilu	35	35	100,00	35	12	34,29	▼
9	Prosentase Bencana yang tertangani dengan baik (%)	100	100	100,00	100	100	100,00	●
10.	Jumlah titik rawan bencana yang telah dipantau dalam rangka mengantisipasi bencana (%)	100	100	100,00	100	100	100,00	●
11.	Prosentase kejadian bencana alam yang tertangani							
	Kecamatan	100	100	100,00	100	100	100,00	●
	BPBD	100	100	100,00	100	100	100,00	●
12.	Prosentase gangguan keamanan wilayah yang dapat diselesaikan (%)							
	Kecamatan	100	97	97,00	100	100	100,00	●
	SATPOL PP	100	97	97,00	100	100	100,00	●
13.	Jumlah Linmas aktif (desa/kel)	249	249	100,00	249		0,00	▼

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tujuan utama pembangunan di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik (*good*

governance) di daerah. Tatakelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan sangat berperan bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah, dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien.

Penerapan tata kelola pemerintah yang baik tersebut harus dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliannya. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujud dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas, dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan daerah. Tanpa pemerintahan yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel, yang akan berakibat langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik, serta menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,22	0,46	37,70	1,21	0,45	37,19	▼
2	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	69,39	65,5	94,39	68,25	67,53	98,95	●
3	Rasio Pos Siskamling per	6,71	4,28	63,79	6,71	6,20	92,40	●

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	jumlah desa/kelurahan							
4.	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,41	4,61	85,21	5,84		0,00	▼
5.	Kemiskinan (%)	85,32	84,28	98,78	86,47		0,00	▼
6.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah (ada/Tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	●
7.	Penegakan PERDA (%)	100	100	100,00	100	61	61,00	▼
8.	Cakupan patroli petugas Satpol PP (kali)	36	36	100,00	60	84	140,00	●
9.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%)	100	53,75	53,75	100	100	100,00	●
10.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (%)	0,0069	0,0066	95,65	0,0069	0,0067	97,10	●
11.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	0,00037	100	27027027,03	0,00037		0,00	▼
12.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	100	100	100,00	100	100	100,00	●
13.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	65,00	65,00	100,00	70,00	70,00	100,00	●
14.	Sistim Informasi Manajemen Pemda	2	2	100,00	2	2	100,00	●
15.	Indeks Kepuasan Layanan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	●

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Masyarakat							
16	Tersusunnya laporan asset yg mendukung laporan Neraca (%)	85,00	99,00	116,47	95,00	99	104,21	●
17	Meningkatnya jumlah pendapatan daerah (%)	70,00	92,69	132,41	90,00	111,29	123,66	●
18	Meningkatnya jumlah PAD (Rp.000.000)	87,12	138,21	158,64	105,421	218,513	207,28	●
19	Meningkatnya PAD terhadap pendapatan daerah (%)	7,40	9,88	133,51	7,80	13	166,67	●
20'	Tersusunnya pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu (%)	85,00	93,27	109,73	95,00	100	105,26	●
21	Opini Laporan Keuangan	WTP	WDP	W	WTP		W	▼
22	Rasio PNS Lulusan S1 (‰)	529.127	540198	102,09	584.338	556,644	0,10	▼
23	Rasio PNS Lulusan S2/S3 (‰)	65.577	67479	102,90	76.845	76,847	0,10	▼
25	Tingkat pengembangan E-Government Bidang Kepegawaian (Aplikasi)	2	2	100,00	2	3	150,00	●
26	Rasio penanganan pelanggaran disiplin aparatur (‰)	1.352	0,483	0,04	1.577	0,248	0,02	▼
27	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat							
	- Diklat fungsional (Org)	20	9	45,00	20	25	125,00	●
	- Diklat teknis (Org)	105	126	120,00	105	77	73,33	▼
29	Pengiriman peserta Diklat Pim II, dan III							
	- Diklat Pim II (Org)	1	3	300,00	1	3	300,00	●
	- Diklat Pim III (Org)	4	5	125,00	4	8	200,00	●
	- Diklat Pim IV (Org)	80	100	125,00	80	80	100,00	●
30	Persentase PNS mengikuti pembinaan aparatur	5,63	5,77	102,49	6,20	5,887	94,96	●

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	daerah (%)							
31	Terbitnya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (SK)	1,592	1.673	105087,94	1,638	2.236	136507,94	●
32	Terbitnya Surat Keputusan Pensiun (SK)	310	300	96,77	300	214	71,33	▼
33	Terbitnya Berita Acara Sumpah Janji PNS (BA)	100	120	120,00	120	37	30,83	▼
34	Jumlah Raperda Inisiatif yang terssun (buah)	7	13	185,71	7	0	0,00	▼
35	Jumlah Raperda yang ditetapkan (buah)	25	8	32,00	25	3	12,00	▼
36	Rancangan Perda yang ditetap	20	8	40,00	20	3	15,00	▼
37	Aspirasi masyarakat yang terjaring dan terakomodir (%)	60	60	100,00	60	93	155,00	●
38	Jumlah Keputusan DPRD (buah)	45	32	71,11	45	35	77,78	▶
39	Pemahaman masyarakat mengenai penilaian terhadap kinerja DPRD (%)	60	50	83,33	62	70	112,90	●
40	Prosentase Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan APIP	74,28	80,08	107,81	75,00	90,63	120,84	●
41	Prosentase Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja	85,00	67,58	79,51	85,00	87,23	102,62	●
42	Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawas Eksternal	78,00	69,15	88,65	80,00	69,67	87,09	▶
43	Prosentase peningkatan	99,20	100	100,81	97,75	97	99,23	●

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	kompetensi CPNS yang sesuai syarat pengangkatan (%)							
44	Urusan yang sudah diterapkan SPM berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh pemerintah	3	3	100,00	3	0	0,00	▼
45	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan	1	1	100,00	0	0	#DIV/0!	▼
46	Penataan SKPD	1	0,8	80,00	0	0	#DIV/0!	▼
47	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	●
48	Keberadaan E-procurement (Ada / Tidak Ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	●
49	Prosentase pelunasan PBB (%)	100	95	95,00	100		0,00	▼
50	Jml RAPBDes yang terivew (desa)	243	243	100,00	243		0,00	▼
51	Jml kecamatan yang memiliki model best practice pelayanan publik (kec)	14	14	100,00	14	14	100,00	●
52	Ketersediaan Nota Kesepakatan KUA, PPAS, KUPA, PPASP	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	●

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

21) Ketanahan Pangan

Pembangunan di bidang ketahanan pangan diarahkan pada upaya pelayanan pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganeekaragaman dan keamanan pangan; dan penanganan kerawanan pangan.

Capaian kinerja urusan ketahanan pangan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan
di Kabupaten Demak Tahun 2013 - 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Regulasi ketahanan pangan	100	100	100,00	100	100	100,00	●
2.	Ketersediaan pangan utama (ton)	332,18	321	96,63	342,33	311,29	90,93	▶
3.	Penguatan Cadangan Pangan (%)	100	100	100,00	100	100	100,00	●
	- Jumlah Desa Mandiri Pangan (desa)	2	-		2	2		▼
	- Jumlah Lumbung Pangan (unit)	6	1	16,67	6	2	33,33	▼
	- Jumlah Gapoktan (Lembaga)	327	176	53,82	327	176	53,82	▼
4.	Ketersediaan Energi dan Protein per kapita (%)	100	100	100,00	100	100	100,00	●
	- Ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	2462	2462	100,00	2512	2500	99,52	●
	- Ketersediaan protein (kkal/kap/hari)	57,7	57,7	100,00	57,7	57,02	98,82	●
	- Konsumsi energi (kkal/kap/hari)	2087,6	1890,00	90,53	2080,3	1798,1	86,43	▶
	- Konsumsi protein (kkal/kap/hari)	56,6	59,20	104,59	56,6	54,4	96,11	●
5.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	60,00	60,00	100,00	80,00	80	100,00	●
6.	Ketersediaan informasi, pasokan harga dan akses pangan di	100	100,00	100,00	100	100	100,00	●

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	daerah (%)							
7.	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	88,00	88,00	100,00	89,00	89	100,00	●
8.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	91,32	90,10	98,66	92,56	90,7	97,99	●
9.	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	48,00	50,00	104,17	54,00	54	100,00	●
10	Peningkatan SDM Penyuluh (%)	70,00	69,00	98,57	75,00	100	133,33	●
11	peningkatan SDM Pelaku utama dan pelaku usaha (%)	47,38	47,00	99,20	55,84	100	179,08	●

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai ► : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan daerah, tetapi juga meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan ke seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai adalah pertumbuhan yang lebih berkualitas yang disertai dengan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Oleh sebab itu, manajemen pembangunan harus diarahkan untuk memacu pembangunan kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, strategi, kebijakan dan program pembangunan diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat secara penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014

No	Indikator Kinerja	2013	2014	Ket.
----	-------------------	------	------	------

		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	100	100	100,00	105	106	100,95	●
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	11,27	11,65	103,37	11,28	11,65	103,28	●
3.	Jumlah LSM (%)	85	52	61,18	90	66	73,33	▼
4.	LPM Berprestasi (%)	14	14	100,00	14	14	100,00	●
5.	PKK aktif (%)	100	100	100,00	100	100	100,00	●
6.	Posyandu aktif (%)	94	100	106,38	96	100	104,17	●
7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	12	13	108,33	13	13	100,00	●
8.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)	20	21	105,00	25	25	100,00	●
9.	Jml desa yang mengikuti lomba desa tk. Kabupaten (desa)	14	14	100,00	14	14	100,00	●
10.	Jumlah Lembaga Desa (BPD/LKMD/RT/RW) yang aktif (desa/kel)	249	249	100,00	249	249	100,00	●
11.	Prosentase kasus ADD yang tertangani (%)	100	100	100,00	100	100	100,00	●
12.	Jml desa/kelurahan yang terbina administrasinya (desa/kel)	249	249	100,00	249	249	100,00	●

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

23) Statistik

Dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan terwujudnya keserasian serta keberhasilan pembangunan, perlu memantapkan penyelenggaraan koordinasi kegiatan semua instansi vertikal di daerah. Hal ini selaras dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan koordinasi akan dicapai keselarasan dan keterpaduan baik dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan tugas. Serta dalam rangka membantu perencanaan pembangunan di daerah dan

juga mendukung kebijakan pembangunan maka fungsi statistik memegang peranan yang sangat penting. Kebijakan pemerintah dapat diambil secara tepat apabila berdasarkan pada informasi statistik tersebut, selain menunjukkan perkembangan hasil pembangunan juga menunjukkan masalah dan tantangan yang dihadapi. Dengan demikian berdasarkan informasi tersebut maka dapat diupayakan langkah-langkah pemecahan permasalahan-permasalahan secara terarah dan tepat guna. Oleh karena itu, Bappeda sebagai wakil dari Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Demak sebagai instansi vertikal di daerah, dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik di Kab. Demak. Capaian kinerja urusan statistik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Statistik
di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	●
2.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	●
3.	Tingkat ketersediaan data/informasi/statistik (%)	40	40	100,00	60	60	100,00	●

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

24) Kearsipan

Pembangunan di bidang kearsipan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan, mengembangkan layanan arsip berbasis teknologi informasi untuk menjamin kemudahan akses informasi kearsipan, meningkatkan sarana prasarana kearsipan khususnya yang menunjang kapasitas dan kualitas penyimpanan arsip sesuai standar, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kearsipan dalam melaksanakan tugas, meningkatkan jumlah SKPD/UKPD yang terlayani dalam kearsipan, meningkatkan

jumlah masyarakat yang terlayani dalam kearsipan. Capaian kinerja urusan kearsipan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Pengelolaan arsip secara baku (SKPD / Desa / Kelurahan) (%)	50	50	100,00	60		0,00	▼
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)	85		0,00	90		0,00	▼
3.	Persentase peningkatan kemampuan SDM pengelola kearsipan (%)	80		0,00	80		0,00	▼

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

25) Komunikasi dan Informatika

Pembangunan di bidang kominfo diarahkan pada upaya peningkatan pelaksanaan diseminasi informasi daerah melalui berbagai media, serta pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

Capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Jumlah jaringan komunikasi	0,11	0,073	66,36	0,11	0,081	73,64	▼
2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,0672 93872	0,054	80,25	0,06729 3344	0,062	92,13	●

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	55	21	38,18	55	55	100,00	☉
4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	15	33	220,00	15	15	100,00	☉
5.	Web site milik pemerintah daerah (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	☉
6.	Pameran/expo (kali)	4	4	100,00	4	4	100,00	☉

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ☉ : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

26) Perpustakaan

Pembangunan di bidang perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas perpustakaan, meningkatkan layanan informasi perpustakaan berbasis teknologi informasi, meningkatkan minat baca masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi Taman Bacaan Masyarakat (TBM), perpustakaan di sekolah, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perpustakaan melalui operasionalisasi perpustakaan keliling.

Capaian kinerja urusan perpustakaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Jumlah perpustakaan (Unit)	70	70	100,00	80	70	87,50	▶
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Org)	55	52	93,88	60	55	92,09	☉
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eks)	26	28	107,48	30	27	89,29	▶

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
 ► : Akan tercapai
 ▼ : Perlu perhatian / upaya keras

2.2.2. Urusan Pilihan

1) Pertanian

Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB di Kabupaten Demak. Pada tahun 2013 sumbangan sektor pertanian kepada PDRB mencapai 43,21%. Di samping sebagai penyumbang terbesar pada PDRB, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam hal penyerapan angkatan kerja.

Pembangunan di bidang pertanian dilaksanakan melalui revitalisasi pertanian, selain untuk lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, juga dalam rangka mengupayakan keterkaitan (*linkage*) produk-produk pertanian dengan produk-produk industri olahan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan para petani. Pada akhirnya, kesejahteraan para petani juga akan mengalami peningkatan. Capaian kinerja urusan pertanian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Pertanian
di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ku/hektar)	59,49	60,43	101,58	59,74	58,73	98,31	●
2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan/peternakan/kehutanan terhadap PDRB (%)	39,45	39,78	100,84	39,29	38,87	98,93	●
3.	Kontribusi sektor pertanian (padi, palawija, hortikultura)	36,65	36,81	100,44	36,58	36,1	98,69	●

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	terhadap PDRB (%)							
4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	0,62	0,82	132,26	0,54	0,69	127,78	●
5.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	100	100	100,00	100	100	100,00	●
6.	Cakupan bina kelompok petani (%)	100	100	100,00	100	100	100,00	●
7.	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	2,17	2,14	98,62	2,16	20,7	958,33	●

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

2) Kehutanan

Urusan kehutanan di Kabupaten Demak dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, yang salah satu programnya yaitu Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Kegiatan yang mendukung program ini antara lain kegiatan reboisasi dan penghijauan hutan yang berupa penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Penanaman Pohon di Lahan Kritis yang dipusatkan di Desa Pilangwetan Kecamatan Kebonagung berupa penanaman 2.000 bibit tanaman kehutanan. Pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove di Kecamatan Sayung, Kec. Karangtengah, Kec. Bonang dan Kec. Wedung, pengembangan tanaman bambu penghasil rebung di Ds. Banyumeneng Kec. Mranggen sebanyak 5.000 bibit bambu, bantuan alat perajang rebung bambu 6 unit. Capaian kinerja urusan kehutanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan
di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	9,84	10,602	107,74	9,89	11052	111749,24	●
2.	Kerusakan Kawasan Hutan(Ha)	356	270	75,84	256	170	66,41	▼
3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,013	0,013	100,00	0,013	0,013	100,00	●

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

3) Energi dan Sumber Daya Mineral

Capaian kinerja urusan energi dan sumberdaya mineral sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Pertambangan tanpa ijin	0	0	0	0	0	0	▼
2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	0	0	0	0	0	0	▼

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

4) Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu potensi utama di Kabupaten Demak. Keberadaan Masjid Demak dan Makam Sunan Kalijaga sebagai situs sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa telah menjadi salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Tengah. Setiap tahun wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia datang berkunjung baik dalam rangka liburan maupun ziarah.

Dengan potensi yang cukup besar, pengembangan pariwisata menjadi prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Demak. Hal ini disebabkan bidang ini mampu memberikan *multiplier effect* yang besar bagi masyarakat sekitarnya. Terciptanya obyek wisata yang besar secara tidak langsung akan mengangkat perekonomian masyarakat sekitarnya. Beberapa obyek wisata di Kabupaten Demak dapat dikembangkan menjadi salah satu icon wisata di Pulau Jawa. Hal ini dapat dilaksanakan jika obyek wisata Demak dapat dikembangkan menjadi sebuah obyek wisata yang berkarakter yaitu obyek wisata religi. Selain itu dikembangkan pula wisata bahari di Surodadi Kec. Sayung dan Morodemak di Kec. Bonang.

Wisata Religi merupakan unggulan Kabupaten Demak yang telah dikenal baik wisatawan domestik dan internasional yaitu Masjid Agung Demak dengan Makam Sultan-Sultan Demak dan Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu. Disamping itu masih ada destinasi pendukung yang lain seperti Wisata Bahari, Agrowisata dan Kampung Jambu Lele serta Tempat Pengasapan Ikan.

Kabupaten Demak menempati urutan ke 3 (tiga) se Jawa Tengah sebagai daerah tujuan wisata dengan kunjungan terbesar (setelah Borobudur dan Prambanan). Memperhatikan besarnya potensi yang ada, mendorong Pemerintah Daerah melakukan upaya pengembangan, pemeliharaan, pembangunan, perbaikan hal-hal yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan pengunjung. Disamping itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak memprogramkan Tahun Kunjungan Wisata Religi Kabupaten

Demak Tahun 2014-2015. Berikut capaian kinerja urusan pariwisata :

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Kunjungan wisata (%)	70%	70	10000,00	70%		0,00	▼
	- Jumlah Wisatawan Mancanegara (org)	1,055	837	79336,49	1,075	577	53674,42	●
	- Jumlah Wisatawan Nusantara (org)	1.125.000	1.539.188	136,82	1.145.000	1456644	127,22	●
2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Rp Ribu)	1.390.000	2.198.123.674	158138,39	1.440.000	2.095.721.917	145536,24	●
3.	Jml kecamatan yang mengirim lomba duta wisata & pentas seni (kec)	14	14	100,00	14	14	100,00	●
4.	Lama tinggal wisatawan (hari)							

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

5) Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Demak memiliki panjang pantai 34,1 km yang merupakan potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar mencakup perikanan laut dan perikanan darat. Daerah perikanan laut tersebar di 4 kecamatan yaitu Sayung, Karang Tengah, Bonang dan Wedung. Sepanjang pantai utara Kabupaten Demak terdapat permukiman atau desa-desa nelayan yang konsentrasi menggantungkan pada laut sebagai mata pencahariannya. Jumlah nelayan di Kabupaten Demak pada tahun 2014 tercatat sebanyak 14.319 Orang dengan

jumlah kapal perikanan sebanyak 3.608 buah, Kabupaten Demak terdapat 2 buah TPI yang masih aktif yaitu di Morodemak dan Wedung. Tahun 2014 Kabupaten Demak berhasil memproduksi garam sebanyak 105.587 Ton yang dihasilkan dari tambak garam seluas 1.172,94 Ha

Kondisi lingkungan pantai di wilayah Kabupaten Demak mengalami degradasi yang cukup memprihatinkan. Kerusakan yang cukup serius akibat abrasi air laut dan mengakibatkan kerusakan serta banyak hilangnya areal pertambakan yang dimiliki petani tambak di Kabupaten Demak. Hingga tahun 2014 wilayah pantai yang terkena abrasi seluas 495,08 Ha. Untuk mengantisipasi diantaranya telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak menanam 150.000 batang mangrove.

Potensi perairan umum Kabupaten Demak seluas 915,66 Ha. Total luas tambak 7.946,97 Ha dan luas kolam air tawar sebesar 83,03 Ha. Jumlah RTP tambak sebanyak 4.040 RTP dan perikanan kolam sebanyak 1.899 RTP. Berikut tabel capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014.

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Produksi perikanan (ton):	31.523,36	32.264,22	102,35	33.911,67	33.672,47	99,29	●
	Produksi Perairan Umum (% - ton)	19,60	17,77	90,66	19,99	11,82	59,13	▼
		1717,39	1.556,99	90,66	1751,74	1.036,10	59,15	▼
	Produksi Perikanan tangkap (% - ton)	19,60	33,64	171,63	19,99	29,00	145,07	●
		1903,01	2.626,29	138,01	1941,07	2.264,03	116,64	●
	Produksi tambak (% - ton)	19,00	18,41	96,89	19,95	19,64	98,45	●
		9.921,59	9.610,27	96,86	10.417,67	10.256,49	98,45	●
	Produksi kolam (% - ton)	18,02	18,23	101,17	19,82	19,86	100,20	●
		18.252,36	18.470,67	101,20	20.077,60	20.115,85	100,19	●
2.	Konsumsi ikan (% -	91,53	25,86	28,25	94,26	28,78	30,53	▼
		23,45	3,10	13,22	24,15	3,70	15,32	▼

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	ton)							
3.	Cakupan bina kelompok nelayan	9	89	988,89	11	104	945,45	●
4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	2.017,1	2.626,29	130,20	2.077,6	2.264,03	108,97	●
5.	Penanaman mangrove (Ha)	216,20	88,90	41,12	218,50	61,25	28,03	▼

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

6) Perdagangan

Peran sektor perdagangan yang akan bertambah penting, ditandai dengan munculnya keunggulan Ekonomi Kreatif sebagai pemicu inovasi perdagangan tanpa batas, kontribusi subsektor perdagangan eceran yang semakin signifikan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Demak, dan penciptaan lapangan kerja secara luas. Hal ini terjadi karena: terbentuknya integrasi domestik di sektor perdagangan; terciptanya intensitas mutual partnership dan linkage antara perdagangan eceran dengan perdagangan besar; terciptanya transaksi domestik dan ekspor dari UKM maupun perusahaan skala besar; terciptanya intensitas koordinasi dalam pengembangan perdagangan eceran, perdagangan besar, dan pembinaan sektor informal; dan tingginya tingkat penerapan manajemen dan teknologi perdagangan, termasuk yang terkait dengan jaringan.

Sektor Perdagangan merupakan bagian dalam menggerakkan Perekonomian Daerah karena pelaku usaha selain dapat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Demak. Adapun kondisi capaian kinerja urusan perdagangan sebagai berikut :

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
di Kabupaten Demak Tahun 2013 - 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	18,84	18,51	98,25	18,90		0,00	▼
2.	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta Rp)	57.070,10	78457,66	137,48	57.470,60	126129,964	219,47	●
3.	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	42,00	25	59,52	45,00	25	55,56	▼
4.	Meningkatnya Sarana Prasarana Perdagangan:							
	Peningkatan jumlah kios yg dibangun (unit)	25	0	0,00	30		0,00	▼
	Peningkatan jumlah los yg dibangun (unit)	500	0	0,00	550		0,00	▼
	Peningkatan jumlah fasilitas umum yg dibangun (unit)	2	0	0,00	2		0,00	▼
5.	Meningkatnya Masyarakat dalam Penggunaan Barang sesuai Standar yang Berlaku (%)	100	100	100,00	100	100	100,00	●

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Peran sistem logistik, intermediasi perdagangan, jaringan koleksi, pengumpul, pengecer, grosir, dan distribusi umumnya semakin berkembang dan meningkat, yang didorong oleh meningkatnya penggunaan teknologi dan transportasi yang memadai, dan meningkatnya indeks kepercayaan bisnis di semua lini perdagangan dan perekonomian. Daya beli konsumen dan tingkat tabungan

masyarakat semakin baik, hal ini ditunjukkan dari tingkat upah minimum dan realisasinya yang semakin baik serta terciptanya semangat kewirausahaan baru.

7) Perindustrian

Program pembangunan bidang industri di Kabupaten Demak diarahkan untuk memberikan sumbangan nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. dengan memilih produk-produk unggulan daerah untuk diolah dan didorong agar tumbuh dan berkembang menjadi kompetensi inti industri daerah. Sebagai salah satu tulang punggung kebangkitan (*prime mover*) ekonomi daerah, industri daerah dikembangkan terpadu dengan pembangunan sektor-sektor lainnya, utamanya sektor-sektor unggulan daerah (sektor pertanian, perikanan dan kelautan, dan pariwisata, koperasi dan UMKM, sehingga secara simultan dapat berperan dalam pembentukan devisa, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak di Bidang Industri Kecil dan Menengah dilaksanakan dengan mengembangkan Industri Kecil dan Kerajinan sebagai pilihan yang sangat strategis karena sektor ini merupakan kegiatan yang banyak menggunakan bahan baku lokal maupun menyerap banyak tenaga kerja yaitu umumnya bersifat padat tenaga kerja serta merupakan industri rumah tangga dengan kapasitas produksi yang rendah.

Industri Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Demak antara lain berupa Industri Aneka makanan dan minuman, Pengolahan Ikan, Konveksi, Garam Rakyat, Kulit Sepatu dan Tas, Mainan anak-anak, Mebel dan Furniture, Rokok serta lainnya. Capaian kinerja urusan perindustrian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian
di Kabupaten Demak Tahun 2013 – 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	10,65	10,12	95,02	10,80		0,00	▼
2.	Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri (%)	22,70	3,20	14,10	23,00		0,00	▼
3.	Pertumbuhan Industri (%)	4,00	0,33	8,25	6,00	0,66	11,00	▼
4.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	35,00	79	225,71	40,00	80	200,00	●
5.	Meningkatnya Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah (%)	6,00	1,2	20,00	8,00	1,4	17,50	▼
6.	Meningkatnya Kualitas Produksi Industri Kecil dan Menengah (unit)	22	20	90,91	23	20	86,96	▶

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

8) Ketransmigrasian

Memperhatikan kondisi demografi terutama kepadatan penduduk yang mencapai \pm 1.220 orang / Km² maka wilayah Kabupaten Demak termasuk kategori yang padat penduduknya. Keberhasilan pembangunan penduduk akan mengakibatkan efek positif bagi pelaksanaan pembangunan lainnya dalam mengatasi masalah kependudukan ini, maka salah satu alternatif pemecahannya adalah melalui program Transmigrasi. Penyelenggaraan Transmigrasi bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkat kesejahteraan masyarakat yang ditempatkan/ diberangkatkan agar dapat hidup layak sesuai dengan harapannya.

Penyelenggaraan program Transmigrasi sebagai salah satu upaya perluasan kesempatan kerja belum berjalan optimal. Salah satunya tercermin dari realisasi penempatan transmigran. Pada tahun 2014 realisasi penempatan transmigran sebanyak 20 KK dari target 35 KK. Tidak terpenuhinya target tersebut dikarenakan belum siapnya lahan Transmigran di Luar Jawa dan tidak adanya SPP (Surat Perintah Pemberangkatan) Transmigrasi dari Pusat (Kementerian).

Capaian kinerja urusan perindustrian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Urusan Ketransmigrasian
di Kabupaten Demak Tahun 2013 - 2014

No	Indikator Kinerja	2013			2014			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Transmigran swakarsa (KK) (%)	30	20	66,67	35	20	57,14	▼
2.	Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB (%)	-				-		

Sumber: Evaluasi Indikator Kinerja Daerah, Bappeda 2014

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kondisi ekonomi makro di Kabupaten Demak masih lebih banyak didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan pemerintah (berupa realisasi belanja APBD).

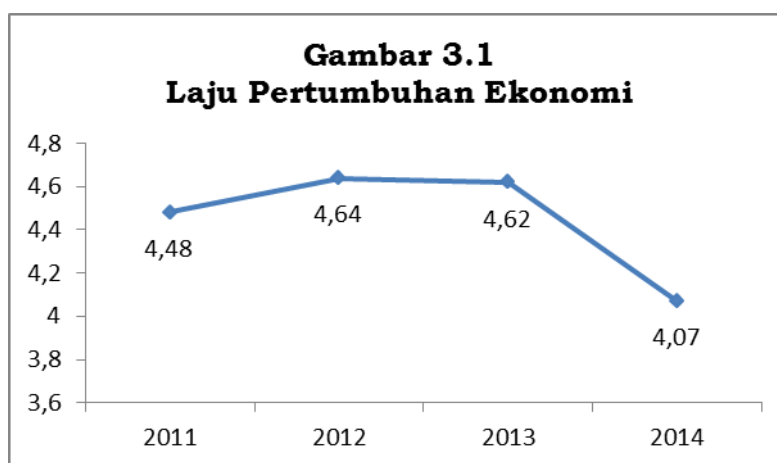
Sementara kinerja sektor usaha masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, hotel, restoran, jasa-jasa dan sektor industri dan pengolahan.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan perekonomian di Kabupaten Demak ke depan diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, pembangunan infrastruktur, penciptaan kondusifitas wilayah, pengendalian pemanfaatan ruang, serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Dari perhitungan selama 4 (empat) tahun terakhir (2011 – 2014) telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif meskipun pada tahun 2014 angka pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari tahun 2013. Jika tahun 2013 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,62% maka pada tahun 2014 menjadi 4,07%.



Sumber: Demak Dalam Angka 2014; BPS Kab. Demak

b. Struktur Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disajikan secara series memberikan gambaran kinerja ekonomi makro dari waktu ke waktu, sehingga arah perekonomian regional akan lebih jelas.

Mulai tahun 2003, penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar baru (2000) sebagai pengganti tahun dasar 1993. Hal ini dilakukan karena adanya perkembangan teknologi dan perekonomian yang mengakibatkan perubahan struktur perekonomian sehingga penggunaan tahun dasar 1993 dianggap tidak representatif lagi.

Perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, begitu juga dengan perkembangan perekonomian Demak.

PDRB Kabupaten Demak atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 6,517 milyar rupiah dan pada tahun 2014 menjadi 8,7 milyar rupiah atau mengalami kenaikan 34,6% selama kurun waktu tiga tahun (2011 – 2014).

Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan yaitu dari Rp. 3.156.126.240 pada tahun 2011 menjadi Rp. 3.595.886.970 pada tahun 2014 atau naik sebesar 13,9%.

Sementara itu selama kurun waktu empat tahun tersebut PDRB perkapita juga mengalami kenaikan dari Rp. 6.089.266 menjadi Rp. 7.932.458 atau naik sebesar 30,26%.

Sektor PDRB yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB di Kabupaten Demak tahun 2014 yaitu sektor pertanian (40,98%); sektor perdagangan, hotel, restoran (19,23%); sektor jasa – jasa (12,43%) dan sektor industri pengolahan (10,61%).

Jika dibandingkan tahun 2013 maka ketiga sektor tersebut masih menjadi sektor dominan pada PDRB di Kabupaten Demak.

Apabila dikaitkan laju pertumbuhan PDRB pada tiap sektor pada tahun 2014, maka diketahui bahwa semua sektor mengalami pertumbuhan positif.

Tabel 3.1
PDRB Kabupaten Demak
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Tahun 2013 – 2014

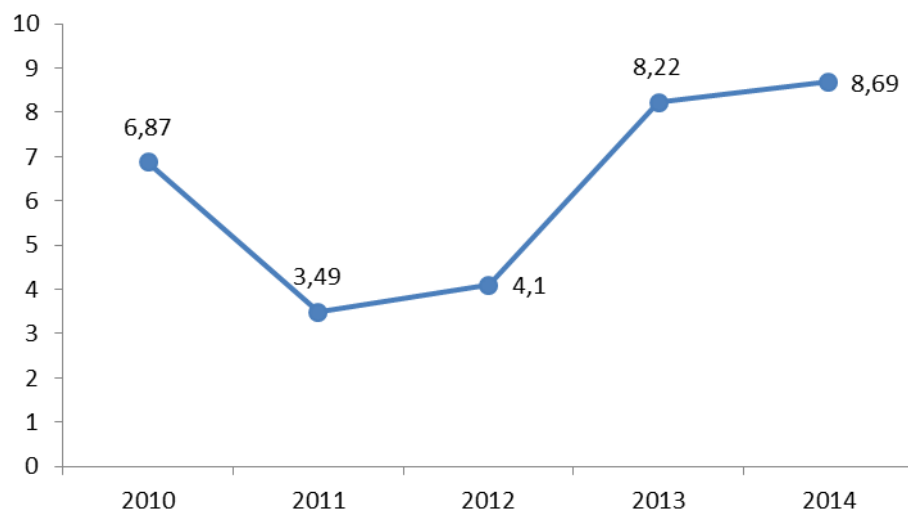
NO	SEKTOR	ADHB (Rp Juta)		Kontribusi (%)	
		2013	2014	2013	2014
1	Pertanian	3.435.410,13	3.564.809,13	43,21	40,98
2	Pertambangan & penggalian	14.782,92	16.307,15	0,19	0,19
3	Industri Pengolahan	804.967,13	922.972,16	10,12	10,61
4	Listrik, Gas & Air Bersih	76.655,93	87.436,69	0,96	1,01
5	Bangunan	422.720,03	475.311,40	5,32	5,46
6	Perdag, Hotel & Restoran	1.471.533,87	1.672.821,61	18,51	19,23
7	Pengangkutan & Komunikasi	401.660,02	460.442,05	5,05	5,29
8	Keuangan, Persew. & Jasa Pers.	369.297,63	418.656,72	4,64	4,81
9	Jasa-jasa	953.800,99	1.081.194,68	12,00	12,43
	PDRB	7.950.828,65	8.699.951,59	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Demak; 2015.

c. Laju Inflasi

Angka inflasi di Kabupaten Demak tahun 2011 – 2014 mengalami peningkatan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai pemicu inflasi yang bersifat eksternal maupun internal antara lain disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditas barang dan jasa, terutama bahan bakar, tarif listrik, maupun kebutuhan pokok.

Gambar 3.2
Laju Inflasi Kabupaten Demak Tahun 2010-2014



Sumber: BPS Kabupaten Demak; 2014

3.1.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan prospek ekonomi Kabupaten Demak pada tahun 2015 antara lain :

- a. Belum optimalnya pemanfaatann sumber daya lokal
- b. Masih rendahnya kualitas SDM mengakibatkan daya saing yang rendah
- c. Koordinasi yang belum optimal antar sektor
- d. Fluktuasi harga BBM mengakibatkan ketidakpastian ekonomi
- e. Tingginya permintaan produk yang berkualitas menuntut peningkatan standar kualitas produk
- f. Pelaksanaan PILKADA serentak pada Desember 2015 diikuti oleh 21 Kabupaten termasuk Demak yang menuntut langkah antisipatif untuk ekonomi lokal.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kinerja keuangan Kabupaten Demak tahun 2016 diperkirakan akan mengalami peningkatan, namun pada saat RKPD ini disusun prediksi pendapatan masih dalam proses perhitungan.

Pendapatan daerah Kabupaten Demak bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah, dengan porsi terbesar pada Dana Perimbangan.

Sedangkan sumber pendapatan utama PAD Kabupaten Demak berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Secara rinci dapat dilihat di tabel 3.2.

Tabel 3.2

Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2016			
NO	URAIAN	APBD TA 2015	PROYEKSI 2016
1	PENDAPATAN DAERAH	Rp 1.530.744.804.000	Rp 1.543.888.831.000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 206.243.460.000	Rp 224.594.307.000
1.2	Dana Perimbangan	Rp 969.294.252.000	Rp 964.087.432.000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp 355.207.092.000	Rp 355.207.092.000
2	BELANJA DAERAH	Rp 1.645.731.698.000	Rp 1.614.888.831.000
2,1	Belanja Tidak Langsung	Rp 966.060.104.000	Rp 1.011.144.160.000
2,2	Belanja Langsung	Rp 679.671.594.000	Rp 603.744.671.000
	Surplus/Defisit	Rp (114.986.894.000)	Rp (71.000.000.000)
3	PEMBIAYAAN DAERAH		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp 123.486.894.000	Rp 79.500.000.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp 8.500.000.000	Rp 8.500.000.000
	Pembiayaan neto	Rp 114.986.894.000	Rp 71.000.000.000
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp -	Rp -

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, serta pembiayaan, yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta taat pada aturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah maka ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2016 meliputi :

- a. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah
- c. Optimalisasi pemanfaatan/pemberdayaan aset
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada guna meningkatkan pendapatan asli daerah
- e. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak / bukan pajak
- f. Meningkatkan dukungan operasional pemungutan pajak dan retribusi
- g. Merencanakan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang memiliki kepastian hukum dengan perkiraan yang terukur, rasional, dan sesuai dengan potensi riil.

Tabel 3.3

Proyeksi Pendapatan Tahun 2016			
NO	URAIAN	APBD 2015	PROYEKSI 2016
1.1	Pendapatan Asli Daerah		
1.1.1	Pajak Daerah	59.823.415.000	67.832.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	18.678.045.000	18.749.307.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.680.000.000	9.700.000.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118.062.000.000	128.313.000.000
		206.243.460.000	224.594.307.000
1.2	Dana Perimbangan		
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	59.389.167.000	54.182.347.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	833.041.455.000	833.041.455.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	76.863.630.000	76.863.630.000
		969.294.252.000	964.087.432.000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1.3.1	Hibah	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	100.854.005.000	100.854.005.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	254.353.087.000	254.353.087.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi	-	-
		355.207.092.000	355.207.092.000
	Jumlah Pendapatan	1.530.744.804.000	1.543.888.831.000

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program kegiatan tahun 2016 serta dalam rangka mendukung capaian kinerja RPJMD, maka kebijakan belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang diarahkan untuk :

- a. Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung
- b. Memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat
- c. Mendukung program/kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan dan kesinambungan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.
- d. Memenuhi kebutuhan belanja yang diwajibkan berdasarkan sumber penerimaannya (antara lain DAK,

DBHCHT, DBH pajak rokok, Dana Kapitasi JKN, BLUD RSUD, Bantuan Keuangan Provinsi, Dana Penyesuaian) serta mendindentifikasi belanja dengan memperhatikan sumber - sumber pendapatan antara lain : DAU diprioritaskan untuk pemenuhan belanja gaji dan tunjangan, belanja SKPD dan pelaksanaan urusan wajib.

- e. Memenuhi kewajiban belanja dana transfer ke desa dalam bentuk bantuan keuangan maupun dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, berdasarkan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang desa.

Sebagai gambaran penerimaan dan kebutuhan pengeluaran daerah kabupaten Demak, sebagai berikut :

Tabel 3.4

Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016			
NO	URAIAN	APBD 2015	PROYEKSI 2016
2	BELANJA DAERAH		
2,1	Belanja Tidak Langsung	966.060.104.000	1.011.144.160.000
2.1.1	Belanja Pegawai	801.685.527.000	858.129.443.000
2.1.3	Belanja Subsidi	0	0
2.1.4	Belanja Hibah	11.972.200.000	3.850.000.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	1.125.000.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	8.100.146.000	8.958.130.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	142.302.231.000	137.081.587.000
2.1.8	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000
2,2	Belanja Langsung	679.671.594.000	603.744.671.000
2.2.1	Belanja Pegawai	71.528.943.000	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	226.057.397.000	-
2.2.3	Belanja Modal	382.085.254.000	-
	Jumlah Belanja	1.645.731.698.000	1.614.888.831.000

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan sumber anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari Silpa (Sisa lebih perhitungan anggaran) tahun sebelumnya atau pinjaman daerah.

Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan penyertaan modal yang ditetapkan dengan peraturan.

Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang diarahkan untuk :

- a. Penggunaan Silpa (Sisa lebih perhitungan anggaran) tahun 2015 sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun 2016 didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional.
- b. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dan prinsip kehati-hatian.

Tabel 3.5

Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016			
NO	URAIAN	APBD 2015	PROYEKSI 2016
3	PEMBIAYAAN DAERAH		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	123.486.894.000	79.500.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
	Jml Penerimaan Pembiayaan Daerah	123.486.894.000	79.500.000.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi Daerah)	8.500.000.000	8.500.000.000
	- Bank Jateng	2.500.000.000	2.500.000.000
	- BPR BKK	500.000.000	500.000.000
	- BKK	1.000.000.000	1.000.000.000
	- PD. BKPD (Bank Pasar)	2.000.000.000	2.000.000.000
	- Apotek Sari Husadha	500.000.000	500.000.000
	- PDAM Kab.Demak	2.000.000.000	2.000.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
	Jml Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.500.000.000	8.500.000.000
	Pembiayaan neto	114.986.894.000	71.000.000.000

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2016

4.1. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak tahun 2011-2016 merupakan visi dari Bupati Demak terpilih pada Pemilihan Kabupaten Demak Tahun 2011, yaitu:

“Terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera, maju, mandiri dan kompetitif dalam suasana kehidupan yang kondusif, agamis dan demokratis.”

Masyarakat yang **sejahtera** merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram dan damai. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, antara lain : menurunnya jumlah penduduk miskin, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya daya beli dan pendapatan masyarakat. Diharapkan dalam lima tahun ke depan indikator-indikator tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya

Selain memiliki masyarakat yang sejahtera, diharapkan masyarakat Kabupaten Demak juga **maju**, dalam arti kualitas sumber daya manusia yang meningkat dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan perkembangan jaman. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dapat diukur dengan berbagai indikator, antara lain : meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, dan menurunnya laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan, yang diwujudkan dalam bentuk berbagai prestasi di tingkat Provinsi maupun Nasional.

Mandiri berarti masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhan sendiri. Kemandirian daerah adalah kondisi dimana masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah secara optimal sehingga mampu mencukupi sebagian besar kebutuhannya, dan tingkat ketergantungan kepada pihak lain semakin berkurang. Diharapkan Kabupaten Demak selama lima tahun ke depan semakin berkurang ketergantungannya dari pemerintah pusat maupun provinsi, termasuk kemandirian di bidang keuangan dan di bidang lainnya. Beberapa indikator kemandirian daerah antara lain : meningkatnya pendapatan asli daerah, meningkatnya ketahanan pangan (produksi lebih besar dari konsumsinya).

Kabupaten Demak diharapkan **kompetitif** dalam arti meningkatnya kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam berbagai aspek, sehingga berdampak positif pada daya saing, yang antara lain tercermin dari meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya investasi dan kepercayaan dunia usaha serta stakeholder lainnya.

Suasana yang **kondusif** yaitu terjaminnya situasi dan kondisi yang memungkinkan semua aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik, tercermin dari tidak adanya konflik, baik didalam pemerintahan maupun masyarakat. Dengan adanya suasana yang kondusif diharapkan proses pembangunan dapat dilaksanakan secara sinergi antar seluruh unsur sehingga dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan dalam visi yang telah ditetapkan

Kehidupan yang **agamis** mengandung arti bahwa kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara semakin meningkat, sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Demak selalu mengedepankan norma-norma agama.

Suasana yang **demokratis** adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang didalamnya praktik-praktik demokrasi berjalan dengan baik, yang ditandai antara lain dengan hubungan yang dilandasi kesetaraan, kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, etika dan moral yang baik, sehingga masing-masing pihak dapat memainkan peranan yang sesuai dengan kapasitasnya. Hal-hal yang perlu dikembangkan antara lain adalah melalui perbaikan peranan dan

kualitas lembaga legislatif, lembaga/partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat serta media komunikasi dan informasi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 10 (sepuluh) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel

Dalam mencapai pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau *Good and Clean Governance*, maka penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih, dan berwibawa bagi terwujudnya kemandirian daerah, antara lain dengan cara meningkatkan kualitas SDM aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, merumuskan perencanaan dengan baik dan tertata sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan terarah, meningkatkan kualitas kinerja pengawasan sehingga terjadinya penurunan jumlah kasus baik di lingkungan internal pemerintah maupun di masyarakat serta meningkatnya suasana kehidupan masyarakat yang kondusif agar tercapai kehidupan yang tentram dan aman di masyarakat. Dalam rangka mencapai kondisi tersebut langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah dengan melaksanakan pelatihan kepada aparatur daerah secara berkesinambungan dan terarah, melaksanakan pengawasan secara efektif, peningkatan budaya kerja dan etika birokrasi, perencanaan yang terarah, penyusunan sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan akuntabel, dan pemberian rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Upaya mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan pendidikan yang memadai untuk seluruh masyarakat yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana, infrastruktur dan fasilitas pendidikan serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.

Upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Upaya ini dilakukan dengan cara pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, peralatan medis yang dibutuhkan, dokter dan tenaga medis yang cukup serta upaya untuk meningkatkan usaha kesehatan yang berbasis masyarakat.

Upaya mewujudkan pelayanan sosial yang dimaksud adalah pelayanan terhadap penyandang masalah sosial dengan cara pemberdayaan fakir miskin, pembinaan penyandang cacat, panti asuhan, panti jompo dan penyandang masalah sosial lainnya.

Diharapkan dengan semakin meningkatnya mutu pendidikan masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat serta pembinaan terhadap penyandang masalah sosial akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi rakyat yang berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, UMKM dan pariwisata.

Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan, maka diperlukan suatu sistem ketahanan pangan yang mampu mempertahankan kuantitas (jumlah pasokan/ketersediaannya) dan kualitas (gizinya) pada tingkat yang aman dan memadai.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dikembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada. Sektor perekonomian yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak (padat karya) seperti sektor pertanian dalam arti luas, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri dan perdagangan serta sektor pariwisata mempunyai kontribusi yang besar dalam PDRB Kabupaten Demak, sehingga diharapkan pengembangan pada sektor tersebut akan dapat mendorong sektor lain untuk meningkat, sehingga dapat mewujudkan daya saing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah-langkah atau kebijakan yang dilakukan dalam mewujudkan misi tersebut adalah dengan meningkatkan pembinaan dan fasilitasi koperasi, UKM dan lembaga ekonomi perdesaan; meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha pertanian/perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, pedagang kaki lima, pariwisata; meningkatkan fasilitasi kerjasama

perdagangan dan perlindungan konsumen; serta mengembangkan keanekaragaman produk pangan;

Dengan kebijakan ini diharapkan meningkatkan produksi pangan baik pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan meningkatkan perekonomian kerakyatan yang terdiri dari koperasi dan usaha kecil dan menengah serta sektor pariwisata.

4. Mendorong investasi dan perluasan lapangan kerja.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dan berkesinambungan yang didorong oleh sumber-sumber pertumbuhan yang berkualitas yang utamanya digerakkan oleh sektor riil. Agar hal tersebut dapat diwujudkan, maka investasi baik dalam negeri maupun luar negeri harus meningkat. Untuk mendorong investasi yang lebih tinggi maka diarahkan untuk penghapusan ekonomi biaya tinggi, antara lain dengan menyederhanakan dan mempercepat prosedur perijinan investasi, termasuk bagi UKM, menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Dengan langkah-langkah itu diharapkan terjadi peningkatan investasi di Kabupaten Demak yang dapat menggerakkan roda perekonomian. Dengan meningkatnya roda perekonomian diharapkan menciptakan sumber-sumber lapangan kerja baru sehingga dapat menciptakan lapangan kerja. Disamping itu untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dilakukan dengan pengembangan kebijakan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan penataan hubungan industrial yang mencerminkan asas keadilan dan kondusif bagi peningkatan produktivitas. Kondisi SDM tenaga kerja juga harus diperhatikan agar tersedia tenaga kerja siap pakai dan kompeten dengan pelatihan-pelatihan di segala bidang meliputi pelatihan otomotif, bengkel las, kelistrikan, menjahit, dsb.

5. Meningkatkan kerukunan dan kualitas kehidupan beragama.

Kehidupan beragama secara Undang-Undang Otonomi Daerah adalah merupakan urusan pemerintah pusat. Tetapi bukan berarti daerah tidak mempunyai peran dalam kehidupan beragama. Daerah juga dituntut untuk berperan dalam rangka mendukung kehidupan beragama.

Peningkatan kualitas kehidupan antar umat beragama merupakan syarat mutlak dalam rangka mendukung program pembangunan di Kabupaten Demak. Peningkatan kualitas kehidupan beragama bisa berarti peningkatan keimanan umat beragama atau peningkatan toleransi antar umat beragama. Tanpa adanya toleransi umat beragama yang baik maka niscaya tidak akan tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat yang berakibat terhambatnya pembangunan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kualitas kehidupan beragama adalah dengan melakukan pembinaan kehidupan beragama melalui masyarakat maupun terhadap lembaga keagamaan, sehingga tercipta kehidupan kebangsaan dan keagamaan yang semakin baik.

6. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian pertumbuhan penduduk

Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan ditujukan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan gender yang terjadi pada berbagai bidang seperti pendidikan yang ditandai dengan angka rata-rata lama sekolah perempuan yang lebih rendah dibanding laki-laki, bidang kesehatan ditandai dengan tingginya angka kematian ibu hamil serta bidang ketenagakerjaan dengan rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.

Pembangunan bidang perlindungan anak dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan peningkatan kualitas tumbuh kembang anak yang masih rendah, perlindungan anak terhadap kekerasan, eksploitasi, perdagangan dan diskriminasi serta pemenuhan hak-hak anak.

Laju pertumbuhan penduduk akan menjadi sia-sia tanpa diimbangi dengan pengendalian jumlah penduduk. Kalau hal itu terjadi, maka kehidupan generasi mendatang akan lebih buruk dibandingkan generasi sekarang. Untuk itu perlu ada upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana.

Langkah-langkah atau kebijakan yang dilakukan dalam mewujudkan misi tersebut adalah dengan peningkatan akses dan peran serta perempuan dalam pembangunan serta fasilitasi dan advokasi perlindungan hak-hak anak. Untuk mengatasi masalah

pengendalian pertumbuhan penduduk dengan kebijakan peningkatan pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB.

7. Mengembangkan potensi pemuda, olahraga dan seni budaya

Generasi muda sebagai tulang punggung bangsa dan negara memiliki posisi strategis karena peran generasi muda sebagai kader penerus perjuangan para pemimpin bangsa di dalam membangun dan mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Berbagai prestasi yang cukup membanggakan dan mengharumkan negara, antara lain melalui prestasi di bidang keolahragaan, seni-budaya, serta karya ilmiah baik di tingkat regional, nasional dan bahkan internasional, namun demikian prestasi tersebut tercoreng oleh perilaku sebagian pemuda di antaranya kenakalan remaja, tawuran antar pelajar dan pemakaian obat-obat terlarang.

Di samping generasi pemuda, masalah olah raga juga perlu mendapat perhatian karena merosotnya prestasi olah raga pada bidang-bidang yang selama ini mengharumkan bangsa dan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya olah raga sebagai pola hidup sehat.

Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi adat ketimuran dengan nilai-nilai moral, sopan santun, ramah dan berbudi pekerti yang luhur, saat ini menghadapi ancaman yang sangat berat yaitu dihadapkan pada kondisi dimana kadar nilai moral melemah, krisis jati diri dan kepribadian pada sebagian masyarakat. Untuk menangkal ancaman tersebut salah satunya dengan menempatkan kebudayaan dalam posisi strategis dalam membangun bangsa dari sisi nilai rohani kemanusiaan.

Upaya mewujudkan misi tersebut dengan Pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan berjiwa entrepreneurship, Peningkatan budaya dan prestasi olahraga serta Penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal.

8. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial

Dalam rangka mempercepat pembangunan penyediaan infrastruktur mutlak harus diprioritaskan karena sebagai syarat

utama berjalannya roda perekonomian suatu daerah. Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan rakyat, untuk dapat melayani dengan baik pemerintah wajib menyediakan infrastruktur yang memadai. Keberhasilan pemerintah bisa diukur dengan ketersediaan infrastruktur di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Demak untuk 5 tahun ke depan 2012-2016 tetap akan memprioritaskan penyediaan infrastruktur khususnya jalan.

Kapasitas (jumlah) dan kualitas infrastruktur yang memadai adalah modal dan daya saing bagi perekonomian rakyat. Mengingat kondisi jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya belum cukup memadai guna memenuhi kebutuhan pelayanan dasar dan mendorong perekonomian rakyat. Untuk itu keberhasilan misi ini sangat diharapkan karena akan menunjang keberhasilan pembangunan daerah pada umumnya.

Untuk mewujudkan misi ini ditempuh dengan upaya peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana infrastruktur, Peningkatan daya dukung dan kualitas jaringan, Peningkatan daya dukung dan kualitas sarana prasarana pos dan telekomunikasi, Peningkatan daya dukung dan pemerataan infrastruktur perdesaan, Peningkatan daya dukung dan kualitas jaringan drainase, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan serta perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Pendayagunaan rencana tata ruang serta Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan jaringan kelistrikan.

9. Mempercepat pembangunan pedesaan dan pengembangan kawasan strategis.

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak perlu percepatan dan penyerasian pembangunan perdesaan karena mayoritas penduduknya tinggal di daerah pedesaan. Pembangunan Masyarakat Desa dilandaskan pada keyakinan bahwa keinsyafan dan tekad untuk mempertinggi tingkat penghidupan dan kehidupan masyarakat yang dimulai dari desa, merupakan faktor yang penting menuju kepada perbaikan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai sifat komperhensif yang berarti kegiatan Pembangunan Masyarakat Desa meliputi seluruh lapangan kehidupan masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa juga merupakan bagian integral dari

pembangunan nasional, sehingga keberhasilan pembangunan desa merupakan salah satu tolak ukur yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional.

Kawasan strategis merupakan kawasan yang mempunyai potensi maupun permasalahan tertentu yang perlu diprioritaskan penanganannya secara sektoral maupun tata ruang, karena memiliki dampak yang penting pada upaya pencapaian tujuan pengembangan wilayah.

Tujuan dari pengembangan kawasan strategis di antaranya adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah kabupaten bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan.

Untuk mewujudkan misi ini ditempuh dengan upaya Pemantapan kualitas pembangunan dan pemerintahan desa serta Peningkatan rencana dan pembangunan prasarana dan sarana penunjang pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

10. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi.

Bagi masyarakat yang pluralis seperti di Negara kita ini, nilai-nilai demokrasi dapat dianggap sejalan dengan kenyataan alamiahnya. Mendorong adanya upaya modernisasi ini mestinya diterapkan dalam berbagai kelembagaan politik, pendidikan politik dan pimpinan politik sebagai prasarana dalam pembangunan politik. Karena itu, selagi memberikan alternatif pemecahan terhadap potensi disintegrasi yang selalu terkandung dalam semua masyarakat pluralis, demokrasi perlu di tempatkan pada garda depan wacana pembangunan politik. Pembangunan politik sebenarnya merupakan agenda politik yang terus menjadi perhatian demi terciptanya tatanan kehidupan politis yang lebih demokratis pada masa datang.

Untuk mewujudkan misi ini ditempuh dengan upaya Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Demokrasi dan Penegakan Hukum.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mendukung pencapaian misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Tujuan adalah pernyataan-

pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah berpedoman kepada visi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan.
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah
4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sementara sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan.
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
4. Memenuhi kriteria SMART-C.

Berdasarkan Visi dan Misi diatas maka rumusan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ingin dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak periode 2011-2016 sebagaimana tabel berikut:

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEMAKIN SEJAHTERA, MAJU, MANDIRI, DAN KOMPETITIF DALAM SUASANA KEHIDUPAN YANG KONDUSIF, AGAMIS, DAN DEMOKRATIS.

**Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Demak 2012-2016**

MISI		TUJUAN		SASARAN		KEBIJAKAN
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Efisien, dan Akuntabel	1.1	Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintahan daerah	1.1.1	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Meningkatkan pembinaan kualitas SDM dan disiplin kerja aparatur
		1.2	Meningkatkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1.2.1	Tertata dan meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD	Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan anggaran SKPD

MISI		TUJUAN		SASARAN		KEBIJAKAN
				1.2.2	Tersedianya data, informasi, statistik yang akurat dan up date	Mengembangkan data/informasi/statistik daerah
				1.2.3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Menata dan Memantapkan Sistem, Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan
		1.3	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah	1.3.1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Menata dan memantapkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah
		1.4	Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah	1.4.1	Meningkatnya Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Pendapatan dan Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel
		1.5	Meningkatkan pengelolaan kearsipan daerah	1.5.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah	Meningkatkan Kapasitas Sistem, SDM Aparatur dan Sarana Kearsipan Daerah
		1.6	Meningkatkan Pelayanan Publik	1.6.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pengendalian Kependudukan	Meningkatkan Kapasitas Sistem, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
				1.6.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi	Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana pos dan jaringan telekomunikasi
		1.7	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.7.1	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Menjaga, Memelihara dan Memantapkan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

MISI		TUJUAN		SASARAN		KEBIJAKAN
		1.8	Tujuan : Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana	1.8.1	Menurunnya jumlah korban bencana	Meningkatkan Kesiapan, Pencegahan dan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
2	Meningkatkan Kualitas SDM melalui Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2.1	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	2.1.1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat	Meningkatkan daya dukung, pemerataan, mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah
		2.2	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	2.2.1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan
		2.3	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat	2.3.1	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat melalui pemberian pelayanan, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial	Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan, dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
3	Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Rakyat yang berbasis Pertanian, Kelautan dan Perikanan, UMKM, dan Pariwisata	3.1	Meningkatkan peranan koperasi, UKM dan lembaga ekonomi perdesaan dalam perekonomian daerah	3.1.1	Meningkatnya kapasitas Koperasi, UKM dan kelembagaan ekonomi perdesaan	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi koperasi, UKM dan lembaga ekonomi perdesaan terhadap sumberdaya produktif
		3.2	Memperkuat peran sektor pertanian dan industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah	3.2.1	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian/perkebunan	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha pertanian/perkebunan

MISI		TUJUAN		SASARAN		KEBIJAKAN
				3.2.2	Meningkatnya produksi peternakan	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha peternakan
				3.2.3	Meningkatnya ketahanan pangan	Mengembangkan keanekaragaman produk pangan
				3.2.4	Meningkatnya produksi hasil kehutanan	Meningkatkan pembinaan usaha kehutanan dan mengembangkan diversifikasi produk hasil hutan
				3.2.5	Meningkatnya sumberdaya energi dan mineral	Meningkatkan penyediaan dan kualitas jaringan kelistrikan perdesaan
				3.2.6	Meningkatnya produksi perikanan	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha perikanan
				3.2.7	Meningkatnya kinerja usaha pelaku industri kecil dan menengah	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha IKM
		3.3	Meningkatkan peran sektor perdagangan dan pariwisata sebagai pendukung perekonomian daerah	3.3.1	Meningkatnya kinerja perdagangan	
				3.3.2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	
4	Mendorong Investasi dan Menciptakan Lapangan Kerja	4.1	Meningkatkan investasi dan perluasan lapangan kerja	4.1.1	Meningkatnya jumlah investasi	Meningkatkan promosi, kerjasama dan pelayanan investasi/penanaman modal
				4.1.2	Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja serta kualitas dan	Meningkatkan lapangan dan kesempatan kerja, kualitas dan

MISI		TUJUAN		SASARAN		KEBIJAKAN
					produktivitas tenaga kerja	produktivitas serta perlindungan tenaga kerja
5	Meningkatkan Kerukunan dan Kualitas Kehidupan Beragama	5.1	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan toleransi beragama	5.1.1	Meningkatkan aktivitas agama, lembaga/prasarana agama, serta komunikasi tokoh agama dan pemerintah	Meningkatkan penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai agama
6	Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian pertumbuhan penduduk	6.1	Meningkatnya pengarusutamaan gender melalui fasilitasi kelembagaan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang serta perlindungan anak	6.1.1	Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dan anak	Meningkatkan akses dan peran serta perempuan dalam pembangunan serta perlindungan anak
				6.1.2	menurunnya % jml pekerja di bawah umur	
				6.1.3	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja	
				6.1.4	Meningkatnya kualitas pendidikan perempuan	
				6.1.5	Meningkatnya perlindungan hukum terhadap perempuan & anak	
		6.2	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera	6.2.1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana	Meningkatkan pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB
				6.2.2	Menurunnya jumlah	

MISI		TUJUAN		SASARAN		KEBIJAKAN
					penduduk miskin (Prasejahtera dan KS1)	
7	Mengembangkan Potensi Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya	7,1	Mewujudkan generasi muda yang bertaqwa kepada Tuhan YME serta meningkatkannya prestasi olah raga baik nasional maupun internasional	7.1.1	Menurunnya kasus kenakalan remaja/tawuran antar pelajar	Meningkatkan pembinaan dan peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan
				7.1.2	Meningkatnya prestasi pemuda dalam pembangunan	
				7.1.3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga dan kepemudaan	Meningkatkan pembinaan, pemasyarakatan dan kapasitas sarana dan prasarana olahraga
				7.1.4	Meningkatnya pencapaian prestasi olah raga	
		7,2	Berkembangnya dan terlestarinya seni dan budaya daerah, bangunan bersejarah serta cagar budaya sebagai identitas bangsa	7.2.1	meningkatnya pelestarian seni dan budaya tradisional	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan dan nilai-nilai budaya lokal
				7.2.2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan	

MISI		TUJUAN		SASARAN		KEBIJAKAN
					cagar budaya	
8	Mengembangkan dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial	8,1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur wilayah yang memadai dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor pendukung aktivitas ekonomi dan sosial	8.1.1	Meningkatnya sarana infrastruktur penunjang perekonomian	Membangun, Memelihara dan Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas infrastruktur
				8.1.2	Meningkatnya daya dukung dan kualitas infrastruktur perdesaan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
				8.1.3	Meningkatnya ketersediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat serta fasilitasnya	Meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan
				8.1.4	Meningkatnya fasilitas perhubungan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas perhubungan
		8.2	Membaiknya mutu lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan	8.2.1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana persampahan serta pengelolaan persampahan

MISI		TUJUAN		SASARAN		KEBIJAKAN
		8.3	Meningkatnya dukungan rencana percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur sosial ekonomi terhadap rencana pembangunan daerah	8.3.1	Meningkatnya dukungan rencana kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta / lembaga	Meningkatkan ketersediaan dokumen rencana kerjasama pembangunan daerah
				8.3.2	Meningkatnya dukungan rencana percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur perkotaan	Meningkatkan ketersediaan dokumen rencana pembangunan perkotaan
				8.3.3	Meningkatnya dukungan rencana pembangunan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	Meningkatkan ketersediaan dokumen rencana pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam
9	Mempercepat Pembangunan Perdesaan dan Kawasan Strategis	9.1	terwujudnya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain	9.1.1	meningkatnya percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa	Meningkatkan daya dukung, pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah
		9.2	Meningkatkan penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis	9.2.1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta	Meningkatkan ketersediaan rencana tata ruang, mengendalikan pemanfaatan ruang

MISI		TUJUAN		SASARAN		KEBIJAKAN
					pengembangan kawasan strategis	
10	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Demokrasi	10.1	Meningkatkan kehidupan demokrasi dan supremasi hukum	10.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu pilkada	Meningkatkan Kesadaran Demokrasi dan Hukum yang Bertanggungjawab
				10.2	Meningkatnya peran dan fungsi partai politik dalam Pemilu	

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2016

Penyusunan prioritas pembangunan tahun 2016 memperhatikan hasil evaluasi dan capaian kinerja tahun – tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat perubahan dinamika pembangunan.

Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan di tingkat pusat dan regional, kondisi dan potensi daerah serta faktor eksternal yang berkembang, maka pelaksanaan pembangunan tahun 2016 kabupaten Demak mengambil tema :

“Pemantapan Infrastruktur, pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan dalam rangka peningkatan kemandirian wilayah.”

Dengan tema tersebut selanjutnya disusun prioritas pembangunan 2016 dengan memperhatikan prioritas tingkat nasional dan provinsi dan mempertimbangkan :

1. Tingkat urgensi dan pengaruhnya terhadap penyelesaian, penanganan isu strategis daerah terutama dalam hal :
 - a. Peningkatan kualitas SDM baik di bidang pendidikan dan kesehatan
 - b. Mengatasi masalah mendesak dan dibutuhkan masyarakat luas yang secara langsung terkait dengan pelayanan dasar dan perekonomian masyarakat.
 - c. Penciptaan stabilitas daerah dan mendorong investasi

- d. Mendorong pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja
 - e. Meningkatkan PAD
2. Penetapan lokasi kegiatan pada kecamatan dan desa dengan tingkat kemiskinan tinggi
 3. Disesuaikan dengan kemampuan daerah baik dalam hal pendanaan, ketersediaan dan potensi sumber daya.

Dengan pertimbangan tersebut maka dirumuskan prioritas pembangunan tahun 2016 sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, meliputi antara lain :
 - a. Meningkatkan pemerataan dan perluasan pendidikan
 - b. Peningkatan sarana-prasarana pendidikan
 - c. Peningkatan konsistensi tenaga pendidik
 - d. Peningkatan kualitas-kualitas pendidik formal dan non formal
 - e. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing yang memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri
 - f. Peningkatan pemerataan dan perluasan akses penyelenggaraan kesehatan
 - g. Peningkatan jaminan kesehatan
 - h. Peningkatan sumberdaya manusia dan sarana pelayanan kesehatan
 - i. Peningkatan kesehatan Ibu dan anak
 - j. Peningkatan gizi , masyarakat dan upaya preventif
 - k. Perwujudan keluarga kecil bahagia
2. Pengembangan sektor – sektor unggulan daerah (meliputi pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata), antara lain dengan :
 - a. Peningkatan instruksi dan produktivitas pertanian perikanan.
 - b. Peningkatan sarana-prasarana dalam mendukung kesehatan pangan.
 - c. Peningkatan diversifikasi usaha pertanian dan pangan lokal
 - d. Peningkatan produktivitas UMKM melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi UMKM, penerapan investasi perluasan pemasaran, dan modal
 - e. Pemeliharaan investasi kecil menengah melalui pengembangan kualitas

- f. Pengembangan daya tarik wisata melalui pengembangan wisata religi, promosi wisata dan pengembangan sarana prasarana pariwisata
3. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran, meliputi :
 - a. Intervensi program/kegiatan yang mengarah pada upaya penanggulangan kemiskinan.
 - b. Peningkatan layanan dasar bagi masyarakat miskin mencakup kesehatan dan pendidikan
 - c. Peningkatan kapasitas keterampilan calon tenaga kerja melalui pendidikan, perluasan dan pengembangan kapasitas kerja
 4. Peningkatan pelayanan publik, meliputi :
 - a. Peningkatan kapasitas SDM aparatur, dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan pelayanan publik.
 - b. Peningkatan pelayanan terpadu dalam mendukung investasi
 - c. Mewujudkan aparatur yang tanggap terhadap perubahan melalui disiplin dan profesionalisme.
 5. Pemantapan infrastruktur, sosial dan ekonomi, meliputi :
 - a. Peningkatan infrastruktur jalan
 - b. Peningkatan sarana-prasarana pemerintah
 - c. Peningkatan sarana prasarana irigasi
 6. Peningkatan kualitas sumberdaya alam, lingkungan hidup penanggulangan bencana, meliputi :
 - a. Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam
 - b. Peningkatan antisipasi bencana

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

TAHUN 2016

Rencana Program Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Demak 2011-2016 terdiri dari Rencana Program Pembangunan Daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi misi kepala daerah serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai SPM (Standart Pelayanan Minimal).

Program prioritas tersebut terbagi dalam 26 urusan wajib – 8 urusan pilihan sebagai berikut :

5.1. Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2016

Dengan memperhatikan prioritas program nasional dan provinsi Jawa Tengah, serta mengacu RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2011-2016, maka Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2016 sebagai berikut:

KODE			RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
			PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
x	Xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x	Xx	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
x	xx	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
x	xx	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
x	xx	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
x	xx	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1			URUSAN WAJIB
1	01		Pendidikan
1	01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
1	01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1	01	17	Program Pendidikan Menengah
1	01	18	Program Pendidikan Non Formal
1	01	19	Program Pendidikan Luar Biasa
1	01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1	01	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1	01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1	02		Kesehatan
1	02	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

KODE			RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
1	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1	02	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan
1	02	18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1	02	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
1	02	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1	02	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1	02	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1	02	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1	02	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1	02	25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1	02	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1	02	27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1	02	28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
1	02	29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
1	02	30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1	02	31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
1	02	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1	03		Pekerjaan Umum
1	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1	03	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1	03	17	Program Pembangunan turap/talud/bronjong
1	03	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1	03	19	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
1	03	20	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
1	03	21	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan
1	03	22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
1	03	23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1	03	24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
1	03	25	Program penyediaan dan pengolahan air baku
1	03	26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
1	03	27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
1	03	28	Program pengendalian banjir
1	03	29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1	03	30	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
1	04		Perumahan
1	04	15	Program Pengembangan Perumahan
1	04	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan
1	04	17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
1	04	18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
1	04	19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1	04	20	Program pengelolaan areal pemakaman
1	05		Penataan Ruang
1	05	15	Program Perencanaan Tata Ruang
1	05	16	Program Pemanfaatan Ruang
1	05	17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

KODE		RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016	
1	06		Perencanaan Pembangunan
1	06	15	Program Pengembangan data/informasi
1	06	16	Program Kerjasama Pembangunan
1	06	17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
1	06	18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
1	06	19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
1	06	20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
1	06	21	Program perencanaan pembangunan daerah
1	06	22	Program perencanaan pembangunan ekonomi
1	06	23	Program perencanaan sosial budaya
1	06	24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1	06	25	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
1	07		Perhubungan
1	07	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1	07	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1	07	17	Program peningkatan pelayanan angkutan
1	07	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1	07	19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
1	07	20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
1	08		Lingkungan Hidup
1	08	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1	08	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1	08	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1	08	18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
1	08	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1	08	20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi
1	08	21	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
1	08	22	Program Pengendalian kebakaran hutan
1	08	23	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
1	08	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1	09		Pertanahan
1	09	15	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
1	09	16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1	09	17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
1	09	18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
1	11		Pemberdayaan Perempuan
1	11	15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
1	11	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1	11	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
1	11	19	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

KODE			RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
1	12		keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1	12	15	Program Keluarga Berencana
1	12	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1	12	17	Program pelayanan kontrasepsi
1	12	18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
1	12	19	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
1	12	20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
1	12	21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
1	12	22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
1	12	23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
1	12	24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
1	13		Sosial
1	13	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1	13	17	Program pembinaan anak terlantar
1	13	18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
1	13	19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
1	13	20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
1	13	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1	14		Tenaga Kerja
1	14	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1	14	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1	14	17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1	15	15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
1	15	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1	15	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1	15	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1	16		Penanaman Modal Daerah
1	16	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1	16	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1	16	17	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
1	17		Kebudayaan
1	17	15	Program Pengembangan Nilai Budaya
1	17	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1	17	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1	17	18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
1	18		Pemuda dan Olah Raga
1	18	15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan
1	18	17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

KODE			RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
1	18	18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
1	18	19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1	18	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1	19	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
1	19	18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
1	19	19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
1	19	20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
1	19	21	Program pendidikan politik masyarakat
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1	20		Pemerintahan Umum
1	20	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1	20	16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1	20	18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
1	20	19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1	20	21	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1	20	22	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1	20	23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1	20	24	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
1	20	25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1	20	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1	20	27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1	20	28	Program Reformasi Birokrasi
1	21		Kepegawaian
1	21	15	Program Pendidikan Kedinasan
1	21	16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1	21	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1	22		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1	22	16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1	22	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1	22	19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
1	23		Statistik
1	23	15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
1	24		Kearsipan
1	24	15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
1	24	16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
1	24	17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

KODE			RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
1	24	18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
1	25		Komunikasi dan Informatika
1	25	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1	25	16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
1	25	17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
1	25		Program kerjasama informasi dan media massa
2			Bidang Pilihan
2	01		Pertanian
2	01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2	01	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
2	01	17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
2	01	18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
2	01	19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
2	01	20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
2	01	21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
2	01	22	Program peningkatan produksi hasil peternakan
2	01	23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
2	01	24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
2	02		Kehutanan
2	02	15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
2	02	16	Program rehabilitasi hutan dan lahan
2	02	17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
2	02	18	Program pemanfaatan kawasan baton industri
2	02	19	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
2	02	20	Program perencanaan dan pengembangan baton
2	03		Energi dan Sumberdaya Mineral
2	03	15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
2	03	16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
2	03	17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
2	04		Pariwisata
2	04	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2	04	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2	04	17	Program Pengembangan Kemitraan
2	05		Kelautan dan Perikanan
2	05	15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
2	05	16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
2	05	17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
2	05	18	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
2	05	19	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
2	05	20	Program pengembangan budidaya perikanan
2	05	21	Program pengembangan perikanan tangkap
2	05	22	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan
2	05	23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

KODE			RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
2	05	24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
2	06		Perdagangan
2	06	15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
2	06	16	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
2	06	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2	06	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
2	06	19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
2	07		Perindustrian
2	07	15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
2	07	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2	07	17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
2	07	18	Program Penataan Struktur Industri
2	07	19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
2	08		Transmigrasi
2	08	15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
2	08	16	Program Transmigrasi Lokal
2	08	17	Program Transmigrasi Regional

5.2. Rencana Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Program – program prioritas tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kegiatan Prioritas sebagaimana Tabel Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017. Terlampir.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjaga kesinambungan Pembangunan Daerah, RKPD Kabupaten Demak Tahun 2016 harus di pedomani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan program / kegiatan pembangunan tahun 2016 dan menjadi landasan bagi penyusun KUA-PPAS untuk menyusun KUA-PPAS untuk menyusun RAPBD Kabupaten Demak tahun 2016.

RKPD Kabupaten Demak Tahun 2016 juga menjadi wadah seluruh pemangku kepentingan termasuk dunia usaha serta masyarakat dalam menyusun program / kegiatan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan.

RKPD juga sebagai instrumen untuk melakukan evaluasi terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Rencana program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD 2016 dalam pelaksanaannya, mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Diharapkan dalam pelaksanaan program / kegiatan RKPD 2016, mampu mendukung upaya menuju tercapainya cita-cita Pembangunan Daerah seperti tertuang dalam RPJMD Kabupaten Demak yakni Terwujudnya masyarakat yang sejahtera “maju dan mandiri”.

BUPATI DEMAK

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 22 TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016

DAFTAR ISI RENJA SKPD

1. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	DIKPORA - 1
2. DINAS KESEHATAN	DINKES – 1
3. RSUD SUNAN KALIJAGA KAB. DEMAK.....	RSUD – 1
4. DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI	DPU – 1
5. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	BAPPEDA – 1
6. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DISHUBKOMINFO – 1
7. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP.....	KLH- 1
8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINDUKCAPIL – 1
9. KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KP2PA – 1
10. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.....	DINSOSNAKERTRANS – 1
11. KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KESBANGPOLINMAS – 1
12. SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA	SATPOL PP – 1
13. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BPBD -1
14. SEKRETARIAT DAERAH.....	SETDA – 1
15. SEKRETARIAT DPRD DEMAK	SETWAN – 1
16. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH.....	DPKKD – 1
17. KANTOR PENDIDIKAN LATIHAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	DIKLAT – 1
18. INSPEKTORAT KABUPATEN.....	INSPEKTORAT - 1
19. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	BPPTPM – 1
20. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BKD – 1
21. KECAMATAN DEMAK.....	KECDEMAK – 1
22. KECAMATAN KARANGTENGAH.....	KECKARANGTENGAH – 1
23. KECAMATAN DEMPET	KECDEMPET – 1

24. KECAMATAN WONOSALAM	KECWONOSALAM – 1
25. KECAMATAN MIJEN.....	KECMIJEN – 1
26. KECAMATAN GAJAH	KECGAJAH – 1
27. KECAMATAN BONANG	KECBONANG – 1
28. KECAMATAN WEDUNG	KECWEDUNG – 1
29. KECAMATAN SAYUNG	KECSAYUNG – 1
30. KECAMATAN KARANGANYAR.....	KECKARANGANYAR – 1
31. KECAMATAN MRANGGEN	KECMRANGGEN – 1
32. KECAMATAN GUNTUR.....	KECGUNTUR – 1
33. KECAMATAN KARANGAWEN.....	KEC KARANGAWEN – 1
34. KECAMATAN KEBONAGUNG	KECKEBONAGUNG – 1
35. KELURAHAN BINTORO.....	KELBINTORO – 1
36. KELURAHAN KADILANGU.....	KELKADILANGU – 1
37. KELURAHAN KALICILIK	KELKALICILIK – 1
38. KELURAHAN BETOKAN	KELBETOKAN – 1
39. KELURAHAN MANGUNJIWAN	KELMANGUNJIWAN – 1
40. KELURAHAN SINGOREJO	KELSINGOREJO – 1
41. BADAN PELAKSANA PENYULUH DAN KETAHANAN PANGAN	BAPPELUH – 1
42. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA.....	BAPERMAS – 1
43. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	KPA – 1
44. DINAS PERTANIAN	DINPERTAN – 1
45. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	DINPARBUD – 1
46. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.....	DINLUTKAN – 1
47. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	DINPERINDAGKOP - 1

SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	URUSAN WAJIB							81.388.483.100			117.521.343.000
1.01.1.01.01	PENDIDIKAN							75.541.483.100			110.511.343.000
1.01.1.01.01	.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						9.308.000.000			9.548.000.000
1.01.1.01.01	.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan	Terselesaikannya surat menyurat perkantoran	Dindikpora	12 bln	APBD Kabupaten	10.000.000		151	20.000.000
1.01.1.01.01	.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan	Tersedianya Sumber Air, Listrik dan telpon	Dindikpora	12 bln	APBD Kabupaten	200.000.000		80	225.000.000
1.01.1.01.01	.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan	Meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	Dindikpora	12 bln	APBD Kabupaten	40.000.000		10	75.000.000
1.01.1.01.01	.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan	Meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	Dindikpora	12 bln	APBD Kabupaten	30.000.000		12 bln	40.000.000
1.01.1.01.01	.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan	Terselesaikannya administrasi perkantoran	Dindikpora	12 bln	APBD Kabupaten	60.000.000		12 bln	75.000.000
1.01.1.01.01	.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan	Tersedianya Komponen listrik/penerangan Kantor	Dindikpora	12 bln	APBD Kabupaten	15.000.000		12 bln	20.000.000
1.01.1.01.01	.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan	Tercapainya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	dindikpora	12 bln	APBD Kabupaten	150.000.000		12	75.000.000
1.01.1.01.01	.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dindikpora	12 bln		20.000.000		100	25.000.000
1.01.1.01.01	.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan	Dindikpora	12 bln	APBD Kabupaten	60.000.000		12 bln	70.000.000
1.01.1.01.01	.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan	Tersedianya kegiatan Rapat-rapat dan koordinasi luar daera	Dindikpora	12 bln	APBD Kabupaten	200.000.000		80	200.000.000
1.01.1.01.01	.01.19	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan	- Tersedianya honor Penjaga UPTD, PTT, MI, SD/SMP/MTs.SMA/MA	Dindikpora	12 bln	APBD Kabupaten	8.523.000.000		8723	8.723.000.000
1.01.1.01.01	.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						2.285.000.000			2.220.000.000
1.01.1.01.01	.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan	Tersedianya unit gedung	Dindikpora	3	APBD Kabupaten	1.550.000.000		3	1.300.000.000
1.01.1.01.01	.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan	- Tercapainya standar Pelayanan Minimal	Dindikpora	20	APBD Kabupaten	300.000.000		30	450.000.000
1.01.1.01.01	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan	- Tersedianya Peralatan kantor yang memadai	Dindikpora	5	APBD Kabupaten	100.000.000		5	100.000.000
1.01.1.01.01	.02.10	Pengadaan mebeleur	Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan	-Tersedianya Mebeleur Kantor yang layaj	Dindikpora	1 paket	APBD Kabupaten	200.000.000		1 paket	200.000.000
1.01.1.01.01	.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Dindikpora	6	APBD Kabupaten	60.000.000		6	70.000.000
1.01.1.01.01	.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dindikpora	3	APBD Kabupaten	75.000.000		3	100.000.000
1.01.1.01.01	.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						410.000.000			400.000.000
1.01.1.01.01	.03.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	- Tercapainya peningkatan mutu layanan pendidikan - Pelatihan dan penyusunan Renstra	Dindikpora	110	APBD Kabupaten	210.000.000		110	200.000.000
1.01.1.01.01	.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Tercapainya peningkatan kinerja aparatur	Dindikpora	100	APBD Kabupaten	200.000.000		100	200.000.000
1.01.1.01.01	.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini						1.085.000.000			1.090.000.000
1.01.1.01.01	.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terselenggaranya Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Meningkatnya Pemahaman Pendidik PAUD	Dindikpora	250	APBD Kabupaten	25.000.000		250	50.000.000
1.01.1.01.01	.15.58	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Meningkatkan Standar Pelayanan Pendidikan	Meningkatkan Kualitas dan Prestasi PAUD	Dindikpora	1	APBD Kabupaten	20.000.000		1	25.000.000
1.01.1.01.01	.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Meningkatkan Standar Pelayanan Pendidikan	Tersedianya Operasional TK Negeri	Dindikpora	2	APBD Kabupaten	155.000.000		1	135.000.000
1.01.1.01.01	.15.60	Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini	Meningkatkan Standar Pelayanan Pendidikan	- Ketersediaan data TK - Peningkatan Standar Pelayanan Minimal	Dindikpora	14 Kec	APBD Kabupaten	50.000.000		14 Kec	100.000.000
1.01.1.01.01	.15.61	Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini	Meningkatkan Standar Pelayanan Pendidikan	Tersusunnya Perda Tentang PAUD	Dindikpora	2	APBD Kabupaten	100.000.000		2	100.000.000
1.01.1.01.01	.15.62	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan Standar Pelayanan Pendidikan	-Tersusunnya Kurikulum, Bahan Ajar, dan Model Pembelajaran	Dindikpora	1	APBD Kabupaten	210.000.000		1	250.000.000

SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.1.01.01	.15.63	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan Standar Pelayanan Pendidikan	- Terciptanya Koordinasi dan Kerjasama antar lembaga dan mitra kerja	Dindikpora	12	APBD Kabupaten	30.000.000		12	80.000.000
1.01.1.01.01	.15.63	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan Standart Pelayanan Pendidikan	- Terciptanya Koordinasi dan Kerjasama antar lembaga dan mitra kerja	Dindikpora	12	APBD Kabupaten	60.000.000		12	80.000.000
1.01.1.01.01	.15.64	Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini, IGTKI, GOPTKI	Meningkatkan Standar Pelayanan Pendidikan	-Tersusunnya Program Kerja PAUD dengan Mitra PAUD	Dindikpora	4	APBD Kabupaten	150.000.000		4	100.000.000
1.01.1.01.01	.15.65	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan Standar Pelayanan Pendidikan	-Meningkatkan Sosialisasi dan publikas PAUD	Dindikpora	6	APBD Kabupaten	250.000.000		6	250.000.000
1.01.1.01.01	.15.66	MONEV PAUD	Meningkatkan Standart Pelayanan Pendidikan	Monev Paud (Tk)	Dindikpora	14 Kec	APBD Kabupaten	35.000.000			
1.01.1.01.01	.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun						31.848.376.100			66.386.316.000
1.01.1.01.01	.16.63	-Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	Oprasional SMPN	Tersedianya Bantuan Penyelenggaraan BOS SD/MI/SDLB,SMP/MTS	Dindikpora	39 Sekolah	APBD Kabupaten	2.305.000.000		14 Kec	3.259.551.000
1.01.1.01.01	.16.63	-Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	Penunjang BOS SD (Siswa)	Tersedianya Bantuan Penyelenggaraan BOS SD/MI/SDLB,SMP/MTS	Dindikpora	14 Kec.	APBD Kabupaten	1.330.506.100			
1.01.1.01.01	.16.63	-Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	Oprasional UPTD	Tersedianya Bantuan Penyelenggaraan BOS SD/MI/SDLB,SMP/MTS	Dindikpora	14 Kec	APBD Kabupaten	840.000.000			
1.01.1.01.01	.16.64	-Penyediaan Biaya operasional madrasah	Operasional SMP Satu Atap (Sekolah)	- Tersedianya operasional SMPN Satap	Dindikpora	4 Sekolah	APBD Kabupaten	200.000.000		4 Sekolah	24.000.000
1.01.1.01.01	.16.67	Penyelenggaraan Paket A setara SD	Biaya administrasi perencanaan & pengawasan DAK SD (Gedung SD Rusak Berat)	- Terselenggaranya Kegiatan Belajar Mengajar Paket A Setara SD	Dindikpora	2	APBD Kabupaten	20.000.000		2	30.000.000
1.01.1.01.01	.16.68	Penyelenggraan paket B setara SMP	Jml. Penerima beasiswa transisi (Siswa)	Terselenggarakannya Pendidikan Kesetaraan Paket B	Dindikpora	5	APBD Kabupaten	80.000.000		6	120.000.000
1.01.1.01.01	.16.69	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	Jumlah peserta sosialisasi informasi Dikdas (Org/Sekolah)	Meningkatnya Prestasi Sekolah	dindikpora	14 kec	APBD Kabupaten	170.000.000		14 Kec	200.000.000
1.01.1.01.01	.16.70	Pembinaan Minat, bakat dan Kreativitas siswa	Jml. Lomba pengembangan minat, bakat & kreatifitas siswa TK. Dikdas (Jenis)	- Meningkatkan Kualitas dan prestasi Siswa	Dindikpora	3	APBD Kabupaten	1.075.000.000		3	950.000.000
1.01.1.01.01	.16.72	Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jml. Peserta UN kleas 6 SD (siswa)	Tersedianya Materi Belajar mengajar dan metode pembelajaran menggunakan tehnologi dan komunikasi	Dindikpora	3 Keg	APBD Kabupaten	1.000.000.000		3 keg	1.100.000.000
1.01.1.01.01	.16.73	Pembiayaan Administrasi, perencanaan dan pengawasan DAK SD/SMP	Jml. peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik SD/SMP (Org/Sekolah)	- Terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan	Dindikpora	1 Sekolah	APBD Kabupaten	800.000.000		1 Sekolah	800.000.000
1.01.1.01.01	.16.76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Jumlah peserta sosialisasi informasi Dikdas (Org/Sekolah)	Tercapainya sekolah yang telah sesuai standar Nasional Pendidikan	Dindikpora	14 Kec	APBD Kabupaten	75.000.000		14 Kec	45.000.000
1.01.1.01.01	.16.78	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Jml. Evaluasi & penyempurnaan KTSP (Sekolah)	Tersusunnya Laporan Hasil Monev	Dindikpora	14 Kec.	APBD Kabupaten	85.000.000		14 Kec	150.000.000
1.01.1.01.01	.16.10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Sarana peningkatan mutu pendidikan sekolah	- Tersedianya ruang UKS dan BP yang Layak	Dindikpora	1	APBD Kabupaten	100.000.000		1	100.000.000
1.01.1.01.01	.16.11	Pembangunan ruang ibadah	Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	-Tersediannya mushola sekolah	Dindikpora	1 Sekolah	APBD Kabupaten	100.000.000		1 Sekolah	100.000.000
1.01.1.01.01	.16.12	Pembangunan perpustakaan sekolah	Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	- Meningkatkan Ilmu Pengetahuan Umum bagi Siswa	Dindikpora	55 Sekolah	APBD Kabupaten			55 Sekolah	4.125.000.000
1.01.1.01.01	.16.19	Pengadaan mebeluer sekolah	Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	- Tersedianya meubelair yang layak (seuai SPM)	Dindikpora	64	APBD Kabupaten	780.000.000		64	800.000.000
1.01.1.01.01	.16.233	Pendamping DAK SD	Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	- Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan	Dindikpora	1 Keg	DAK	13.597.782.000		1 Keg	13.597.782.000

SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						8	9				
1	2	3	4	5	6	7		10	11	12	
1.01.1.01.01	.16.236	Pendamping DAK SMP	DAK untuk SMP (Sekolah)	- Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan	Dindikpora	1 Keg	DAK	5.952.573.000		1 Keg	25.108.831.000
1.01.1.01.01	.16.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	-Tersedianya sarpras Pendidikan SD yang layak dan nyaman	Dindikpora	268	APBD Kabupaten	0		268	5.494.000.000
1.01.1.01.01	.16.57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja Pendidik	Jml. peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik SD/SMP (Org/Sekolah)	- Meningkatkan Pemahaman Pendidik melalui Evaluasi Diri Sekolah	Dindikpora	80 Sekolah	APBD Kabupaten	160.000.000		80 Sekolah	180.000.000
1.01.1.01.01	.16.58	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Jml. peserta pelatihan kompetensi siswa berprestasi SD/SMP (Org/Sekolah)	Tersusunnya Kisi-kisi dan Soal Sem. I dan II SD	Dindikpora	3 Mapel	APBD Kabupaten	100.000.000		3 Mapel	80.000.000
1.01.1.01.01	.16.59	Pelatihan penyusunan kurikulum	Jml. Peserta pelatihan penyusunan kurikulum (Org/Sekolah)	- Tersusunnya Kurikulum Sekolah	Dindikpora		APBD Kabupaten	585.000.000		-544	600.000.000
1.01.1.01.01	.16.60	Pembinaan forum masyarakat peduli masyarakat	peningkatan Kapasitas Penerapan Standart Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKP) SPM Dikdas/Hibah	Tercapainya indikator Penapaian SPM	Dindikpora		APBD Kabupaten	1.259.195.000			
1.01.1.01.01	.16.60	Pembinaan forum masyarakat peduli masyarakat	peningkatan Kapasitas Penerapan Standart Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKP) SPM Dikdas/Pendampingan	Tercapainya indikator Penapaian SPM	Dindikpora		APBD Kabupaten	200.000.000			
1.01.1.01.01	.16.60	Pembinaan forum masyarakat peduli masyarakat	Pendidikan Karakter Bangsa Tingkat Siswa & Pembelajaran Lalu Lintas (Org/Skolah)	- Meningkatnya kesadaran Siswa untuk berlalu lintas dan KLA, Kemitraan dengan komite, pendampingan karakter bangsa	Dindikpora	14 Kec	APBD Kabupaten	333.320.000		14 Kec	1.582.152.000
1.01.1.01.01	16.65	Penyediaan buku Pelajaran SD	Terlaksananya kegiatan baca tulis Alquran	Meningkatnya baca tulis Alquran pada siswa	Dindikpora	14 Kec	APBD Kabupaten	200.000.000			
1.01.1.01.01	16	Peningkatan Sarpras SMP	Jumlah sarana prasarana sekolah yang belum bermanfaat	Tercapainya 8 standart Nasional SPM sarpras SMP	Dindikpora		APBD Kabupaten	500.000.000			
1.01.1.01.01	.17	Program Pendidikan Menengah						22.636.241.000			23.774.527.000
1.01.1.01.01	.17.09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Operasional SMA Negeri (Sekolah) - BOMM	- Tersedianya tempat parkir yang nyaman	- SMAN 2 Mranggen, SM AN2 Demak, SMAN 1 Demak	3	APBD Kabupaten	400.000.000		3	410.000.000
1.01.1.01.01	.17.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jml. Laporan Anev program dikmen (dok)	- Tersedianya saluran air yang lancar	SMPN 2 Mranggen	1 sekolah	APBD Kabupaten	100.000.000		1Sekolah	100.000.000
1.01.1.01.01	.17.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Operasional SMA Negeri (Sekolah) - BOMM	-Terpenuhinya sarana laboratorium bahasa, TIK, Komputer	Dindikpora	4 sekolah	APBD Kabupaten	200.000.000		4 Sekolah	200.000.000
1.01.1.01.01	.17.45	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	Jml. Laporan Anev program dikmen (dok)	- Tercapainya 8 standar Nasional pendidikan dan SPM	- Dindikpora	12	APBD Kabupaten			-12	700.000.000
1.01.1.01.01	.17.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jml. Peserta pelatihan TIK (Siswa/Sekolah)	-Meningkatkan Mutu pelayanan Pendidikan	Dindikpora	90	APBD Kabupaten	100.000.000		90	110.000.000
1.01.1.01.01	.17.58	Pelatihan penyusunan kurikulum	Jml. Peserta pelatihan TIK (Siswa/Sekolah)	- Terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan	Dindikpora	90 Sekolah	APBD Kabupaten	200.000.000		90 Sekolah	200.000.000
1.01.1.01.01	.17.59	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan	Jml. Peserta pelatihan TIK (Siswa/Sekolah)	Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan	Dindikpora	90 Sekolah	APBD Kabupaten	94.750.000		90 Sekolah	1.000.000.000
1.01.1.01.01	.17.60	Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaan, terpencil dan kepulauan	Operasional SMA Negeri (Sekolah) - BOMM	- Terpenuhinya Biaya Operasional untuk SMAN dan SMKN	Dindikpora	16 Sekolah	APBD Kabupaten	1.172.000.000		16 Sekolah	1.172.000.000
1.01.1.01.01	.17.61	Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)	Operasional SMA Negeri (Sekolah) - BOMM	Terpenuhinya 8 Standar Pendidikan Nasional	Dindikpora	90 Sekolah	APBD Kabupaten	400.000.000		90 Sekolah	400.000.000
1.01.1.01.01	.17.63	Penyelenggaraan paket C setara SMU	Jml. Laporan Anev program dikmen (dok)	-Peningkatan Pengelolaan Pendidikan kesetaraan Paket C	Dindikpora	5 lembaga	APBD Kabupaten	73.000.000		5 Lembaga	90.000.000
1.01.1.01.01	.17.64	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)	Peserta pelatihan penyusunan kurikulum (Org/Sekolah)	Meningkatkan mutu Pelayanan pendidikan	Dindikpora	90 Sekolah	APBD Kabupaten	100.000.000		90 Sekolah	100.000.000
1.01.1.01.01	.17.65	Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	Peserta pelatihan penyusunan kurikulum (Org/Sekolah)	-Terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan	Dindikpora	90 Sekolah	APBD Kabupaten	270.000.000		90 Sekolah	506.000.000

SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.1.01.01	.17.66	Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri	Operasional SMA Negeri (Sekolah) - BOMM	- Terjalinnnya Kerjasama SMK dengan Dunia Usaha dan Industri	Dindikpora	90 Sekolah	APBD Kabupaten	50.000.000		4	100.000.000
1.01.1.01.01	.17.67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Lomba SMA/SMK 25 Cabang OSN, FLS2N, O2SN, LKS, Lomba Seni, dll	Tercapainya sekolah yang telah sesuai standar Nasional Pendidikan	Dindikpora	90 Sekolah	APBD Kabupaten	850.000.000			
1.01.1.01.01	.17.67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Biaya administrasi perencanaan & pengawasan program indonesia pintar bantuan siswa miskin	-Terlaksananya kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Dinas Dikpora Kab. Demak	12	APBD Kabupaten	185.000.000		12	200.000.000
1.01.1.01.01	.17.68	Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah	Verifikasi Ijin Operasional Sekolah SMA/SMK (Sekolah Baru) - BOMM	- Terselenggarakannya Akreditasi Sekolah Menengah	Dindikpora	90 Sekolah	APBD Kabupaten	30.000.000		90 Sekolah	50.000.000
1.01.1.01.01	.17.69	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Verifikasi Ijin Operasional Sekolah SMA/SMK (Sekolah Baru) - BOMM	- Terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan	Dindikpora	14 Kec	APBD Kabupaten	85.000.000		14	85.000.000
1.01.1.01.01	.17.71	Operasional SMK N 1 Karangawen	Operasional SMK Negeri (Sekolah)	Tercapainya peningkatan mutu pelayanan pendidikan	Dindikpora	1	APBD Kabupaten	50.000.000		1	75.000.000
1.01.1.01.01	.17.74	Operasional SMA N 1 Wedung	Operasional SMA Negeri (Sekolah) - BOMM	- Terselenggranya kegiatan sekolah	Dindikpora	1	APBD Kabupaten	50.000.000		1	50.000.000
1.01.1.01.01	.17.76	Pendamping DAK sekolah menengah	Jml. Laporan Anev program dikmen (dok)	- Tercapainya 8 Standar Nasional Pendidikan	Dindikpora	1 Keg	APBD Kabupaten	1.050.000.000		1 Keg	1.373.036.000
1.01.1.01.01	.17.78	DAK Sekolah Menengah Kejuruan	Jml. Laporan Anev program dikmen (dok)	- Tercapainya Standar pelayanan minimal	Dindikpora	1 kegiatan	DAK	10.795.015.000		1 Kegiatan	10.795.015.000
1.01.1.01.01	.17.79	DAK SMA	Jml. Sekolah yang diakreditasi (sekolah)	- Tercapainya 8 standar nasional pendidikan	Dindikpora	1 paket	DAK	5.558.476.000		1 paket	5.558.476.000
1.01.1.01.01	.17.80	Pembiayaan Administrasi Perencanaan dan pengawas DAK SMA/SMK	Jml. Laporan Anev program dikmen (dok)	Terpenuhinya administrasi perencanaan dan pengawasan DAK SMA/SMK	Dindikpora	1 Kegiatan	APBD Kabupaten	823.000.000		1 Kegiatan	500.000.000
1.01.1.01.01	.18	Program Pendiidikan Non Formal						1.359.000.000			1.075.000.000
1.01.1.01.01	.18.01	-Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jml peserta Workshop Pemanfaatan limbah menjadi APE (keg)	- Tercapainya Peningkatan Kinerja Pendidik Pendidikan Kesetaraan	Dindikpora	100	APBD Kabupaten	120.000.000		100	120.000.000
1.01.1.01.01	.18.02	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Jml laporan hasil koordinasi & kerjasama PAUD non formal (dok)	Peningkatan Mutu Lembaga PNF	Dindikpora	10	APBD Kabupaten	520.000.000		10	250.000.000
1.01.1.01.01	.18.03	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Jml laporan hasil koordinasi & kerjasama PAUD non formal (dok)	Menciptakan Lapangan Pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat	Dindikpora	14 kec	APBD Kabupaten	30.000.000		14 Kec	40.000.000
1.01.1.01.01	.18.04	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Jml laporan hasil koordinasi & kerjasama PAUD non formal (dok)	Mengurangi Angka Buta Aksara	Dindikpora	14 Kec	APBD Kabupaten	30.000.000		14 Kec	40.000.000
1.01.1.01.01	.18.05	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Jml laporan hasil koordinasi & kerjasama PAUD non formal (dok)	Mengembangkan Informasi dan tehnologi Guna menciptakan ketrampilan	Dindikpora	14 Kec	APBD Kabupaten	25.000.000		14 Kec	50.000.000
1.01.1.01.01	.18.07	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal	Jml laporan hasil koordinasi & kerjasama PAUD non formal (dok)	Peningkatan Ketersediaan data dan Informasi PNF di 14 Kec	Dindikpora	14 Kec	APBD Kabupaten	84.000.000		14 Kec	100.000.000
1.01.1.01.01	.18.07	Sosialisasi PKH	Workshop peningkatan Ketrampilan PNF	Peningkatan Ketrampilan dan Menciptakan Lapangan Pekerjaan	Dindikpora	14 Kec	APBD Kabupaten	30.000.000		14 Kec	
1.01.1.01.01	.18.08	Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal	Jml laporan hasil koordinasi & kerjasama PAUD non formal (dok), workshop pencegahan kekerasan berwawasan gender (dok)	Peningkatan Manajemen Pengelolaan PNF	Dindikpora	25 Penilik 3 Ormit	APBD Kabupaten	130.000.000		25 Penilik 5 Ormit	100.000.000
1.01.1.01.01	.18.09	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	Jml laporan hasil koordinasi & kerjasama PAUD non formal (dok)	Peningkatan Pembelajaran Pendidikan Non Formal	Dindikpora	14 Kec	APBD Kabupaten	50.000.000		14 Kec	60.000.000
1.01.1.01.01	.18.12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Jml laporan hasil koordinasi & kerjasama PAUD non formal (dok)	Peningkatan Produktivitas Lembaga PNF	Dindikpora	2 keg	APBD Kabupaten	30.000.000		3 Keg	30.000.000
1.01.1.01.01	18.15	Operasional Lembaga Paud	Peningkatan kualitas mutu pendidik dan operasional PAUD	Meningkatnya kualitas Pendidikan PAUD	Dindikpora	14 kec	APBD Kabupaten	100.000.000			
1.01.1.01.01	18.16	Fasilitas Pendidikan Keaksaraan	Pengembangan Lembaga PNF	Peningkatan keakaran Mandiri	Dindikpora	5 keg	APBD Kabupaten	45.000.000			

SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.1.01.01	18.28	Workshop pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Pengembangan Lembaga PNF	Peningkatan pengelolaan administrasi TBM	Dindikpora		APBD Kabupaten	30.000.000			
1.01.1.01.01	18.33	Workshop Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Pengembangan Lembaga PNF	Peningkatan pengelolaan lembaga PNF	Dindikpora		APBD Kabupaten	50.000.000			
1.01.1.01.01	.18.13	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Jml laporan hasil koordinasi & kerjasama PAUD non formal (dok)	Peningkatan Manajemen Pengelolaan PNF	Dindikpora	14 Kec	APBD Kabupaten	85.000.000		14 Kec	85.000.000
1.01.1.01.01	.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan						2.485.000.000			2.560.000.000
1.01.1.01.01	.20.01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jml peserta sosialisasi sertifikasi pendidik (Org)	Terselurnya tunjangan profesi dan tepat sasaran	Dindikpora	300	APBD Kabupaten	50.000.000		300	50.000.000
1.01.1.01.01	.20.02	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan	Kepala sekolah memehami tugas pokok dan kewajibannya	Bimtek Kepala Sekolah	Dindikpora	80	APBD Kabupaten	50.000.000		80	50.000.000
1.01.1.01.01	.20.03	Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jml peserta pembinaan PPPG (guru)	Guru PAUD Non Formal terlatih dan memenuhi standar kualifikasi Guru TK	Dindikpora	100	APBD Kabupaten	50.000.000		100	40.000.000
1.01.1.01.01	.20.04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Jml guru SD yang mengikuti pembinaan KKG (org)	Terlaksananya sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan	Dindikpora	120	APBD Kabupaten	50.000.000		120	50.000.000
1.01.1.01.01	.20.05	Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)	Jml peserta pembinaan LPMP - Pengawas (Org)	Pengawas mampu melaksanakan tugas pokok dan pengawasan terhadap Kepala Sekolah	Dindikpora	80	APBD Kabupaten	130.000.000		80	50.000.000
1.01.1.01.01	.20.06	Pembinaan Pusat pendidikan dan Pelatihan guru (PPPG)	Jml peserta pembinaan PPPG (guru)	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui pembinaan PPPG	Dindikpora kab. demak	80	APBD Kabupaten	50.000.000		80	50.000.000
1.01.1.01.01	.20.07	Pendidikan lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Jml penerima bantuan pendidikan S1 (guru)	Tersedianya Pendampingan dan biaya study lanjut ke S1/DIV	Dindikpora Kab. Demak	400	APBD Kabupaten	190.000.000		400	375.000.000
1.01.1.01.01	.20.08	Pengembangan Mutu dan Kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jml peserta bintek TU (Org)/tenaga administrasi	Pengembangan mutu dan kualitas program Pendidikan dan pelatihan bagi pendidik	Dindikpora Kab. Demak	80	APBD Kabupaten	230.000.000		5 keg	140.000.000
1.01.1.01.01	.20.09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Jml guru terdata/ terpetakan (Org)	Terdatanya Guru sekolah Negeri maupun Swasta	Dindikpora Kab. Demak	600	APBD Kabupaten	20.000.000		600	30.000.000
1.01.1.01.01	.20.10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi Pendidik	Jml guru yang naik pangkat (org)	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Dindikpora Kab. Demak	1.550	APBD Kabupaten	1.525.000.000		1.550	1.550.000.000
1.01.1.01.01	.20.11	Pengembangan sistem Perencanaan dan pengendalian program profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Operasional Pengawas dan penilik (Org)	Penyediaan Operasional Peningkatan Kinerja Pengawas	Dindikpora	100	APBD Kabupaten	85.000.000		120	100.000.000
1.01.1.01.01	.20.12	Monitoring, evaluasi, pelaporan	Kepala sekolah memehami tugas pokok dan kewajibannya	Terlaksananya Kinerja Kepala Sekolah Negeri dan swasta	Dindikpora	100	APBD Kabupaten	55.000.000		120	75.000.000
1.01.1.01.01	.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan						3.124.866.000			2.457.500.000
1.01.1.01.01	.22.01	-Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Laporan anev program manajmen pelayanan pendidikan (dok)	- Tersedianya laporan Hasil Kinerja bidang Pendidikan	Dindikpora	1	APBD Kabupaten	150.000.000		1	157.500.000
1.01.1.01.01	.22.02	-Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Tersusunnya Profil Pendidikan Tersedianya data pokok pendidikan	Tersedianya dokumen perencanaan dan Kaldik	Dindikpora	4 Dokumen	APBD Kabupaten	400.000.000		4 Dokumen	450.000.000
1.01.1.01.01	.22.05	Pembinaan Dewan Pendidikan	Laporan anev program manajmen pelayanan pendidikan (dok)	- Tersedianya Kegiatan Dewan Pendidikan	Dindikpora	1	APBD Kabupaten	100.000.000		1	100.000.000
1.01.1.01.01	.22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen Pendidikan	Tersusunnya Profil Pendidikan Tersedianya data pokok pendidikan	Ketersediaan Data dan Informasi Pendidikan	Dindikpora	5	APBD Kabupaten	375.000.000		5	400.000.000
1.01.1.01.01	.22.08	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya, serta Diskusi Ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Tersusunnya Profil Pendidikan Tersedianya data pokok pendidikan	- Tersedianya informasi tentang PPDB ONLINE Tersedianya informasi untuk Masyarakat tentang PPDB ONLINE dan Tercapainya Manajemen Mutu ISO di Jenjang SMA/SMK	Dindikpora	1 Keg dan 1 Sekolah	APBD Kabupaten	980.000.000		2 Sekolah	400.000.000
1.01.1.01.01	.22.09	Monitoring, evaluasi, dan Pelaporan	Laporan anev program manajmen pelayanan pendidikan (dok)	Tersedianya Laporan BOS dan Bantuan	Dindikpora	3 Dokumen	APBD Kabupaten	519.866.000		3 Dokumen	250.000.000

SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.1.01.01	.22.13	Fasilitasi Penyelenggaraan UN SD, UN SMP, UN SMA, UN SMK UNPP	Laporan anev program manajemen pelayanan pendidikan (dok)	Terselenggaranya ujian Nasional untuk pencapaian 8 standar nasional Pendidikan	Dindikpora	3 Kegiatan	APBD Kabupaten	500.000.000		3 kegiatan	600.000.000
1.01.1.01.01	.22.15	Bantuan Operasional PGRI	Tersusunnya Profil Pendidikan Tersedianya data pokok pendidikan	Tersedianya Operasional PGRI	Dindikpora	12 bln	APBD Kabupaten	100.000.000		12 Bln	100.000.000
1.01.1.01.01	.23	Program Pendiakan Tinggi						1.000.000.000			1.000.000.000
1.01.1.01.01	.23.01	Operasioanl Akademi Komunitas Negeri (AKN)	Tersedianya Operasional Akademi Komunitas Negeri (AKN)	Terlatihnya 100 orang pemandu bakat dan minat olahraga	Dindikpora Kab. Demak	100	APBD Kabupaten	1.000.000.000		150	1.000.000.000
1.18.1.01.01		PEMUDA DAN OLAH RAGA						5.847.000.000			7.010.000.000
1.18.1.01.01	.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda						80.000.000			120.000.000
1.18.1.01.01	.15.05	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Terlaksananya Pendidikan Akhlak Siswa	Terlaksananya Pendidikan Akhlak Siswa	Dindikpora	6	APBD Kabupaten	80.000.000		6	120.000.000
1.18.1.01.01	.16	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan						425.000.000			805.000.000
1.18.1.01.01	.16.02	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jml peserta pelatihan kepemimpinan OSIS (siswa)	Bertambahnya jumlah pelajar yang memiliki kemampuan kepemimpinan	Dindikpora Kab. Demak	100	APBD Kabupaten	100.000.000		120	120.000.000
1.18.1.01.01	.16.04	Fasilitasi pekan tamu wicara organisasi pemuda	Jml temu wicara organisasi pemuda (kali)	Jumlah peserta yang terlibat	Dindikpora Kab. Demak	100	APBD Kabupaten	50.000.000		100	100.000.000
1.18.1.01.01	.16.06	lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda	Seleksi Paskibraka (kali)	Terpilihnya personel dan tersusunnya Paskibraka	Dindikpora Kab. Demak	100	APBD Kabupaten	275.000.000		100	585.000.000
1.18.1.01.01	.17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda						140.000.000			200.000.000
1.18.1.01.01	.17.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Pelatihan & bantuan modal bagi Kelompok Usaha Pemuda Produktif / KUPPP (kelompok)	terlatihnya pemuda terampil dan produktif	Dindikpora Kab. Demak	100	APBD Kabupaten	40.000.000		150	100.000.000
1.18.1.01.01	.17.02	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	Pelatihan & bantuan modal bagi Kelompok Usaha Pemuda Produktif / KUPPP (kelompok)	Terlatihnya kelompok pemuda dalam produksi barang hasilsablon	Dindikpora Kab. Demak	100	APBD Kabupaten	100.000.000		150	100.000.000
1.18.1.01.01	.19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga						95.000.000			160.000.000
1.18.1.01.01	.19.01	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	Peserta bintek pengembangan mutu organisasi & tenaga keolahragaan (org)	Pengembangan Organisasi Pemuda	Dindikpora	100	APBD Kabupaten	45.000.000		100	60.000.000
1.18.1.01.01	.19.04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga	Peserta bintek pengembangan mutu organisasi & tenaga keolahragaan (org)	terpilihnya atlet cabang-cabang olahraga yang memiliki fisik memadai	Dindikpora Kab. Demak	100	APBD Kabupaten	50.000.000		150	100.000.000
1.18.1.01.01	.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga						5.107.000.000			5.725.000.000
1.18.1.01.01	.20.03	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat	PPLPD 10 cabor	PPLPD 10 cabor	Dindikpora	100	APBD Kabupaten	100.000.000		100	100.000.000
1.18.1.01.01	.20.04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jml peserta Pekan olahraga Pelajar Daerah / Popda (atlet pelajar)	- Terselenggaranya Kejurda Pelajar	Dinas Dikpora Kab. Demak	3 bln	APBD Kabupaten	500.000.000		3 bln	1.000.000.000
1.18.1.01.01	.20.05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jml festival olahraga masal / olahraga rekreasi (kali)	Festival Olahraga Tradisional	Dindikpora	100	APBD Kabupaten	75.000.000		120	75.000.000
1.18.1.01.01	.20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jml peserta kompetisi Liga Pendidikan Indonesia/LPI (sekolah)	Liga Pendidikan Indonesia	Dindikpora	100	APBD Kabupaten	2.500.000.000		120	2.500.000.000
1.18.1.01.01	.20.07	Pemasalan Olahraga bagi Pelajar , Mahasiswa dan Masyarakat	Jml peserta Pekan olahraga Pelajar Daerah / Popda (atlet pelajar)	Festival olahraga usia dini, terlaksananya kegiatan car fre day	Dindikpora	100	APBD Kabupaten	1.000.000.000		120	1.000.000.000
1.18.1.01.01	.20.08	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Jml festival olahraga masal / olahraga rekreasi (kali)	Pemberian tali asih bagi aatlit, pelatih dan pembina olahraga	Dindikpora	100	APBD Kabupaten	732.000.000		150	800.000.000
1.18.1.01.01	.20.11	Pengembangan olahraga rekreasi	Jml festival olahraga masal / olahraga rekreasi (kali)	Terselenggaranya 3 kali festival	Dindikpora	100	APBD Kabupaten	100.000.000		150	150.000.000
1.18.1.01.01	.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jml Training Camp Wasit dan Pelatih Olahraga (Kali)	Pelatihan sport massage	Dindikpora	100	APBD Kabupaten	100.000.000		150	100.000.000
Jumlah total :								81.388.483.100			117.521.343.000